

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN SMA TARUNA KASUARI NUSANTARA

PROVINSI PAPUA BARAT



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**
2021

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN SMA TARUNA KASUARI NUSANTARA

PROVINSI PAPUA BARAT

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS

Dr. Meko Sagrim, SP, M.Si

Ir. Abdul Havidz Fatamasya, M.Si.

Martua Hutabarat, SP, M.Sc.Dec.Prac

Ferdinandus Hurulean, SP

Dr. Ir. D Wasgito Purnomo, M.Si

Ir. Budi Santoso, MP. Ph.D

Dr. Alberthus Girik Allo, SP, M.Si

Dr. Eliaser Sirami, S.Hut, MP

Dr. Amestina Matualagen, SP, MP

Dr. Aplena Elen Bless, SP, M.Sc

Purbo Kurniawan, SP, M.Si

Berlian Sorga Abdullah, S.Pd

Mohamad Farid, S.Hut, M.Si

Reindra L.C. Hallatu

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3

Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari

Papua Barat 98312

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN SMA TARUNA KASUARI NUSANTARA PROVINSI PAPUA BARAT

Desain Layout

Christoffel S.I. Maweikere, S.Si, M.Si

Diterbitkan dan Dicitak oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat

ISBN

978-623-6113-08-0



Dicitak dengan Pembiayaan Anggaran

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)

Provinsi Papua Barat Tahun 2021

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- I. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/ atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi actual;
- II. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- III. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- IV. Penggunaan untuk kepentingan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/ atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan sehingga dokumen Studi Kelayakan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara ini dapat diselesaikan.

Dokumen Studi Kelayakan ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, Universitas Papua (Unipa) dan mitra pembangunan. Dokumen ini menjadi dasar dalam menyusun Master Plan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di Provinsi Papua Barat. Secara khusus, tim penyusun berkesempatan berdiskusi dan melihat langsung infrastruktur dan proses belajar di SMA Taruna Nusantara Magelang. Proses penyusunan dilakukan dengan metode studi pustaka dan juga metode wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Dokumen Studi Kelayakan ini telah dipresentasikan di hadapan para pengambil kebijakan di Provinsi Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat. Adapun isi dokumen Studi Kelayakan ini adalah (1) Pendahuluan, (2) Kondisi Umum Pendidikan di Provinsi Papua Barat, (3) Metodologi, (4) Aspek Kelayakan, (5) Kesimpulan dan Saran serta Daftar Pustaka.

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam penyusunan Studi Kelayakan ini, terutama dalam memperoleh data dan informasi di masa pandemi Covid-19. Namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap berkordinasi dengan pihak terkait, data dan informasi pendukung untuk Studi Kelayakan ini akhirnya dapat diperoleh dan dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di Provinsi Papua Barat.

Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Provinsi Papua Barat ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan masyarakat adat. Atas segala kontribusi waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan kami sampaikan terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dokumen ini tentu saja masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran serta kritik konstruktif sangat diharapkan, sehingga semakin memperbaiki dokumen Studi Kelayakan ini. Semoga dokumen Studi Kelayakan ini bermanfaat bagi pihak terkait, khususnya dalam pendirian dan pengembangan SMA Taruna Kasuari Nusantara di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, Mei 2021

Penyusun

SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA BARAT



Kita patut memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan berkatNya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkarya di negeri yang Tuhan berikan bagi kita yang kaya sumber daya alam dan masyarakatnya yang hidup rukun dan damai.

Saya mengucapkan terima kasih dan Selamat kepada Tim Penyusun Naskah Studi Kelayakan Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara yang telah merampungkan tugasnya dibawah koordinasi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat dan Rektor Universitas Papua. Naskah ini menjadi langkah awal pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di Provinsi Papua Barat untuk menjadi landasan dalam merencanakan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara. Hasil dari studi kelayakan ini menyimpulkan bahwa pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara layak untuk dilanjutkan termasuk dalam aspek input siswa, kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya pendidik dan siswa serta pendanaannya.

Persoalan sumber daya manusia menjadi pengamatan dan perhatian saya sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat. Saya meyakini apabila kita dapat mencetak pemuda-pemudi yang handal sedari awal, maka mereka akan menjadi modal dasar dalam pembangunan di masa mendatang. Kita butuh bekerja keras menemukan talenta-talenta yang tersembunyi dari wilayah pesisir sampai pegunungan. Pemerintahan kami saat ini selalu menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang progresif dan konstruktif di masa mendatang. Impian ini tentunya akan dapat dicapai bila kita bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan ini. Melalui SMA Taruna Kasuari Nusantara ini, saya ingin agar generasi muda di Papua Barat menjadi terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi, kedisiplinan dan mencintai negeri sendiri, karena sumberdaya alam yang kaya di Provinsi Papua Barat ini membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh untuk pengelolaannya di masa mendatang.

Saya berharap kepada semua pihak mendukung untuk mewujudkan impian bersama ini dan semoga dokumen studi kelayakan ini dapat menjadi rujukan untuk melakukan inovasi baru dalam dunia pendidikan kita di tingkat SMA sebagai gerbang untuk mencetak sumber daya manusia yang tangguh dan berprestasi di masa mendatang. Mari kita besama membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.

Manokwari, Mei 2021



Drs. Dominggus Mandacan

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT



Pujian Hormat dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hikmat dan anugerahNya kita masih dapat berkarya dan menyelesaikan Naskah Studi

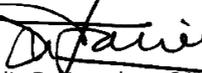
Kelayakan Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di Provinsi Papua Barat

Sebagai kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat dan sebagai Penanggung Jawab penyusunan Naskah Studi Kelayakan Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara, apresiasi yang tinggi kepada tim penulis yang telah menyelesaikan naskah studi ini. Hasil studi kelayakan ini sudah menyimpulkan pendirian SMA taruna “layak” untuk didirikan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi dan peran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi Balitbangda adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Balitbangda menggunakan hasil kajian ilmiah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Studi Kelayakan ini merupakan produk ilmiah yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Master Plan SMA Taruna Kasuari Nusantara sekaligus dasar dalam pendirian dan pengembangannya di masa mendatang.

Saya meyakini dengan perencanaan yang baik, SMA Taruna Kasuari Nusantara ini dapat menghasilkan generasi Papua Barat yang unggul, berdaya saing global, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Manokwari, Mei 2021



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M. Si

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	11
KONDISI UMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA BARAT	20
Kondisi Eksisting Pendidikan di Provinsi Papua Barat	20
Isu strategis/permasalahan umum SMA di Provinsi Papua Barat	21
Kebutuhan atau urgensi pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara	24
KERANGKA PENULISAN	26
ASPEK KELAYAKAN	33
Input Siswa	33
Kurikulum	39
Tujuan kurikulum	39
Karakteristik Kurikulum	40
Landasan Kurikulum	41
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	43
Kerangka Kurikulum	45
Beban Belajar	49
Dukungan kurikulum	49
Penilaian kelayakan	50
Sumber Daya Manusia Guru dan Tendik	52
Pendidik Kurikulum Umum	52
Pendidik pada kurikulum Khusus	53
Tenaga Kependidikan	53
Analisis	56
Pembiayaan Pendidikan	56
Pendapatan Daerah	56
Analisis kelayakan	60
Sarana dan Prasarana (Sarpras)	62
Fasilitas Belajar Mengajar	62

Asrama Siswa	69
Ruang Makan dan Dapur	70
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	70
Kantor Sekolah	71
Lapangan Upacara	72
Rumah Guru dan Rumah Kepala Sekolah	72
Tempat Ibadah	72
Kelembagaan	73
Persepsi Masyarakat	74
Sitem Penjaminan Mutu SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat	75
Ketentuan Umum	75
Implementasi SPMI pada SMA	76
PENUTUP	97
DAFTAR PUSTAKA	100

**Untuk Membangun Sumber Daya Manusia
di Papua Barat Tidak ada Istilah
Tidak ada Rotan Akar pun Jadi
“ROTAN TETAP HARUS ROTAN”
(Drs. Dominggus Mandacan)**



PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencantumkan tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 kemudian menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan serta pengajaran dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lebih rinci menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya menjadi prioritas dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan baik secara nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pendidikan juga merupakan proses dan usaha yang sadar serta terus menerus untuk menciptakan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan bermartabat serta berdaya saing.

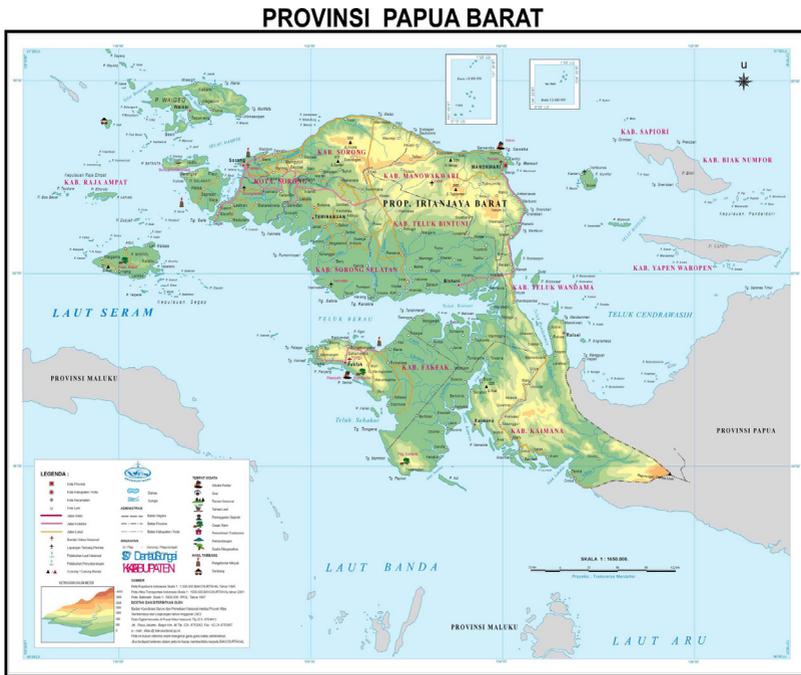
Provinsi Papua Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Papua, yaitu salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang pada awal pembentukannya bernama Provinsi Irian Jaya Barat, dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999⁽¹⁾ sebagai provinsi ke-2 di Tanah Papua dan ke-31 di Indonesia dengan ibukota Manokwari. Luas wilayah Provinsi Papua Barat mencapai 102.955,15 Km² dan terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kotamadya (BPS, 2019). Provinsi Papua Barat terletak di kawasan kepala burung dengan batas-batas wilayah yakni, sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram.

⁽¹⁾ Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)

Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota. Provinsi Papua Barat bersama dengan Provinsi Papua diberikan “otonomi khusus” dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 berjumlah 959.617 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 504.788 jiwa (52.6%), dan perempuan sebanyak 454.829 jiwa (47.4%), atau rasio jenis kelamin penduduk adalah 110.98, dengan kata lain, setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 111 penduduk lelaki di daerah tersebut. Penduduk usia sekolah (5-19 tahun) di Provinsi Papua Barat cukup banyak yaitu 28,22%. Hal ini merupakan suatu modal sumber daya manusia potensial untuk mendukung pembangunan. Namun ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi dunia pendidikan untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk menyiapkan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat untuk dapat mendukung pembangunan. Data BPS tahun 2019 juga menunjukkan terjadi trend peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Provinsi Papua Barat sebesar 2.55% (2010-2019). Namun data-data BPS tersebut tidak menyebutkan komposisi penduduk berdasarkan suku atau etnis Orang Asli Papua (OAP) dan bukan OAP.

Provinsi Papua dan Papua Barat secara geografi, sosial, ekonomi dan budaya berbeda dengan sebagian besar provinsi di Indonesia dan tentu saja memerlukan penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah Republik Indonesia. Salah satu kekhususan tersebut adalah dengan penetapan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 atau sering disebut dengan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus). Dengan adanya UU Otsus tersebut maka memberikan peluang dan tantangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua Barat untuk mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusianya. Selain itu, dengan adanya undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan atau perundang-undangan khusus, termasuk di bidang pendidikan. Seperti disebutkan pada Pasal 56 paragraf 1

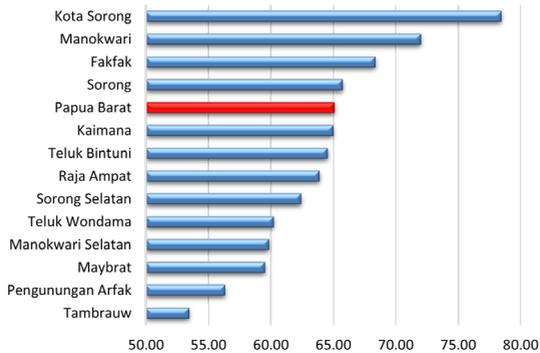


Gambar 1. Peta Provinsi Papua Barat

hingga 6, pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dari UU Otsus dan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan dengan mengalokasikan dana khusus terhadap pelayanan pendidikan.

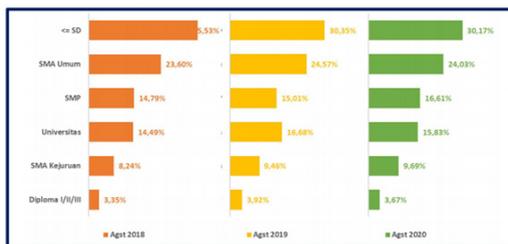
Salah satu metode untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah atau negara adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Nilai IPM Provinsi Papua Barat masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia⁽²⁾. Meskipun selama kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi trend kenaikan IPM provinsi Papua Barat, namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, IPM Provinsi Papua Barat masih berada pada urutan bawah dengan nilai 64.7. Hanya 3 kabupaten dan Kota Sorong yang memiliki IPM lebih tinggi dari IPM rata-rata Provinsi Papua Barat, yakni Kotamadya Sorong, Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Sorong. Grafik berikut menunjukkan IPM Provinsi Papua Barat tahun 2020 berdasarkan kabupaten/kota.

⁽²⁾ IPM Papua Barat tahun 2020 berada pada peringkat 33 dari 34 Provinsi di Indonesia (Source Url: <https://www.bps.go.id/indikator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>)



Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kabupaten tahun 2020 (Sumber BPS, 2021)

Dari grafik IPM diatas terlihat bahwa Kota Sorong memiliki IPM tertinggi, diikuti Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Sorong. Keempat kabupaten/kota ini merupakan Kabupaten Induk di Provinsi Papua Barat dan IPM keempat kabupaten kota tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Provinsi Papua Barat. Kabupaten Tamberauw yang merupakan kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong, memiliki IPM paling rendah, diikuti oleh Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategi atau terobosan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat dalam aspek pendidikan, kesehatan dan perekonomian.



Sumber : Data diolah dari Sakernas Agustus 2018-2020 dengan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi di Provinsi Papua Barat Tahun 2020.

Menurut data BPS, secara nasional, struktur tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh lulusan SMP kebawah (60.24%), diikuti oleh pendidikan

menengah (27.12%) dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 12.24%. Dengan kata lain, struktur tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bekerja serta memiliki daya saing yang rendah. Tidak berbeda jauh dari struktur tenaga kerja Indonesia, berdasarkan data dari BPS Provinsi Papua Barat pada tahun 2020, struktur tenaga kerja di Provinsi Papua Barat juga didominasi oleh lulusan SMP kebawah. Gambar 3 berikut ini menunjukkan persentase penduduk usia produktif yang bekerja menurut pendidikan tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019⁽³⁾.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa lulusan SMP kebawah mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi Papua Barat (46,78%). Tenaga kerja yang didominasi oleh lulusan SMP kebawah belum mendapatkan bekal keterampilan yang mumpuni karena pada jenjang pendidikan dasar, peserta didik tidak diajarkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan spesifik yang sesuai dengan minat dan bakat serta sesuai dengan dunia usaha/industri. Dengan kata lain, sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Papua Barat belum terampil.

Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan pelayanan pendidikan di Tanah Papua. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pendidikan juga telah dilakukan, namun masih saja terjadi ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak dapat mengakses pendidikan yang baik dan berkualitas di semua jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan mereka tidak sekolah atau putus sekolah karena berbagai alasan, seperti ekonomi, sosial, kondisi geografis dan juga karena kondisi pelayanan pendidikan khususnya di daerah pedesaan dan terpencil yang masih perlu perbaikan, perhatian dan peningkatan. Mereka yang tidak sekolah dan putus sekolah, terutama di jenjang SD/MI, hampir pasti kembali terkena risiko tidak mampu membaca, menulis dan berhitung (calistung). Selain itu, untuk memasuki jenjang Pendidikan Tinggi, khususnya universitas-universitas favorit, lulusan SMA di Provinsi Papua Barat juga masih kalah bersaing dengan rekan-rekannya dari daerah lain. Oleh karena itu diperlukan sekolah unggulan untuk menyiapkan generasi-generasi muda calon pemimpin di Papua Barat dan juga di Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, berkarakter dan memiliki wawasan kenusantaraan.

⁽³⁾ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, 2019. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat, Agustus 2019.

Provinsi Papua Barat semenjak didirikan dan juga sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus telah memberikan banyak kemajuan. Namun ternyata masih terdapat beberapa masalah mendasar yang belum terselesaikan, dan hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia, yang salah satu indikatornya adalah pendidikan. Sebagian besar (kurang lebih 70%) OAP tinggal di kabupaten-kabupaten pemekaran dan daerah pedesaan yang umumnya bermatapencaharian di sektor ekstraktif dengan pendidikan dan produktivitas yang rendah. Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa instansi menunjukkan bawa faktor utama penyebab permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat adalah karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya orang asli Papua. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini masih tampak meskipun telah banyak juga perbaikan di segala aspek (UNDP, 2000).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022, permasalahan-permasalahan di sektor pendidikan yang umum terjadi di Provinsi Papua Barat adalah ketidakhadiran kepala sekolah dan guru, kondisi infrastruktur yang belum memadai, kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mencukupi serta distribusi guru yang tidak merata antara perkotaan dan daerah pedesaan dan terpencil. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, baik oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan berbagai pihak. Meskipun terjadi perkembangan dan peningkatan pelayanan, namun kondisi pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan di provinsi Papua Barat masih memprihatinkan. Permasalahan-permasalahan pelayanan pendidikan di Papua telah menjadi concern berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, juga instansi dan lembaga swasta dan bahkan organisasi dari luar negeri. Berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Papua telah dilakukan, baik berupa program kegiatan dan juga regulasi atau kebijakan untuk peningkatan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-undang Otonomi bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kemudian Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan kebijakan mengenai standar pelayanan minimal⁽⁴⁾, standar sarana dan prasarana juga standar pengembangan

⁽⁴⁾ Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota, Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

tenaga pendidik dan kependidikan, penjaminan mutu pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar (Dikdas) serta Pendidikan Menengah (Dikmen). Program-program pemerintah pusat lainnya juga disahkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Papua dan Indonesia secara umum seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Sarjana Mengajar di daerah Terdepan Terluar dan Tertinggal (SM3T) dan program guru garis depan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat tersebut memberikan keleluasaan, pedoman dan payung hukum bagi pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat untuk mengembangkan kebijakan dan program untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat misalnya mengeluarkan program Kolese Pendidikan Guru (KGP) untuk menjawab kebutuhan guru-guru asli Papua yang mau mengabdikan di daerah-daerah pedalaman dan terpencil di Papua. Selain itu, mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan seperti Perda tentang Pendidikan Integratif Komunitas Adat dan Terpencil di Papua (Perda Pikat) Perda Nomor 2 Tahun 2013. Provinsi Papua Barat juga mengeluarkan program Sekolah Kecil, Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Tunjangan Kinerja untuk guru-guru yang mengajar di daerah terpencil dan terisolir, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta kerjasama dengan stakeholders yang peduli terhadap pendidikan di Papua Barat. Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemprov Papua Barat adalah dengan dibentuknya SMA Keberbakatan Olahraga Papua Barat pada bulan Mei Tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga merespon permasalahan-permasalahan tersebut dengan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dengan visi: TERWUJUDNYA PROVINSI PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT yang juga merupakan visi dari Gubernur terpilih Drs. Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohammad Lakotani, SH., M. Si. Salah satu misi pembangunan daerah tersebut antara lain peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Papua Barat yang berdaya saing. Untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pendidikan merupakan cara tepat yang dipandang penting dilaksanakan sebagai strategi dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat guna mengejar ketertinggalan dalam semua aspek

pembangunan untuk mencapai kesetaraan harkat dan martabat di Indonesia. Namun seperti telah disebutkan di atas, meskipun telah dilakukan upaya dan usaha untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Papua Barat, masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Khusus untuk jenjang pendidikan SMA, Angka Partisipasi Murni (APM) masih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Demikian juga dengan lulusan SMA, khususnya OAP yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masih banyak yang tidak dapat masuk ke universitas-universitas terkemuka di Indonesia dan luar negeri.



**Untuk Membangun
Sumber Daya Manusia
di Papua Barat
Tidak ada Istilah**

**Tidak ada Rotan Akar
pun Jadi**

**“ROTAN TETAP
HARUS ROTAN”**

(Drs. Dominggus Mandacan)

KONDISI UMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

2.1. Kondisi Eksisting Pendidikan di Provinsi Papua Barat

Data pendidikan secara umum di provinsi Papua Barat tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Murid, Sekolah dan Guru berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi Papua Barat tahun 2019

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah		
		Murid	Sekolah	Guru
1.	SD	136.044	1.071	8.074
2.	M. Ibtidaiyah (MI)*	8.157	48	5.221
3.	SMP	50.109	310	3.948
4.	M. Tsanawiyah (MTs)*	4.643	32	437
5.	SMA	28.912	122	2.299
5.	SMK	15.375	54	1.243
6.	M. Aliyah (MA)*	2.318	19	272

Sumber: BPS, Papua Barat dalam Angka 2020 (Diolah)

*MI, MTs dan MA merupakan pendidikan Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag)

Dari Tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar murid berada di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (58,7%), diikuti jenjang sekolah menengah pertama (22,3%) dan sekolah menengah atas (18,9%). Apabila dilihat dari jumlah sekolah, terlihat bahwa jumlah SMP dan MTs adalah 340 sekolah dan SMA sederajat berjumlah 195 sekolah. Secara umum, sekolah SMA sederajat yang ada di Provinsi Papua Barat belum dapat menampung lulusan SMP yang akan masuk ke SMA setiap tahun. Oleh karena itu, pembentukan Unit Sekolah Baru satuan SMA di Papua Barat masih sangat memungkinkan.

SMA di Provinsi Papua Barat masih sangat sedikit yang terakreditasi A, yakni hanya sebesar 19.7%, angka ini jauh lebih kecil dari rata-rata nasional yang sebesar 45%. SMA yang terakreditasi B (45.9%), akreditasi C (26.2%) dan belum terakreditasi sebesar 8.2%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha yang lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan akreditasi sekolah, khususnya untuk mencapai akreditasi A.

Guru SMA di Provinsi Papua Barat sebesar 98.4% sudah berkualifikasi D4/S1, namun sebagian besar (64.1%) belum bersertifikat pendidik. Rasio guru dan murid SMA di Provinsi Papua Barat masih cukup ideal. Menurut Kemdikbud, rasio guru dan murid yang ideal untuk jenjang pendidikan SMA adalah 1:20. Rasio guru dan murid di Papua Barat adalah 1:12, dengan demikian, efektivitas pembelajaran di kelas dapat masih dapat terjaga, karena rasio guru dan siswa yang terlalu tinggi akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran di Provinsi Papua Barat di jenjang pendidikan SMA juga masih perlu mendapatkan perhatian. Total terdapat 156 laboratorium untuk SMA Negeri dengan kondisi baik sebanyak 21 laboratorium. Laboratorium dengan kondisi rusak ringan dan rusak sedang adalah sebanyak 131 laboratorium dan rusak berat sebanyak 4 laboratorium. Dengan demikian, sebagian besar laboratorium belum dapat digunakan secara optimal untuk menunjang proses belajar mengajar karena kondisi yang rusak. Demikian halnya dengan SMA swasta, dari 105 laboratorium yang ada, hanya 14 laboratorium yang dalam kondisi baik. Sisanya dalam kondisi rusak ringan sebanyak 72 laboratorium, rusak sedang sebanyak 6 laboratorium dan rusak berat sebanyak 13 laboratorium. Ruang kelas SMA Negeri secara keseluruhan berjumlah 1.077 kelas. Dari jumlah ruang kelas tersebut, sebagian besar dalam kondisi baik dan rusak ringan (949 kelas), rusak sedang sebanyak 91 kelas dan 13 kelas rusak total atau rusak berat .

2.2. Isu strategis/permasalahan umum jenjang pendidikan SMA di Provinsi Papua Barat

Selain permasalahan pendidikan yang telah disebutkan di atas, berikut ini adalah isu-isu strategis atau permasalahan umum jenjang pendidikan SMA di Provinsi Papua Barat menurut Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat 2017-2022. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA di Provinsi Papua Barat masih rendah.

Fasilitas Sarana Prasarana ruang kelas dan laboratorium di Provinsi Papua Barat sebagian rusak dan belum dapat dipergunakan secara optimal untuk menunjang proses belajar mengajar. Tingkat kelulusan cukup tinggi (97.49%), namun yang masuk ke perguruan tinggi ternama masih sangat minim. Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan karakter anak di lingkungan keluarga.

Secara umum persentase ketidakhadiran guru di sekolah dalam melaksanakan tugas di Papua Barat sebesar 26,3% (Untuk Pendidikan Dasar). Kurangnya sarana prasarana sekolah yang berkualitas dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar misalnya perpustakaan, komputer, akses internet dan lainnya. Kondusivitas yang perlu ditingkatkan di sekolah, terdapat sekolah-sekolah yang tidak dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar karena pemalangan oleh pemilik hak ulayat.

Indikator terhadap akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya untuk setiap kelompok usia sekolah dan setiap jenjang pendidikan. Pemerataan dan akses pelayanan pendidikan tersebut dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

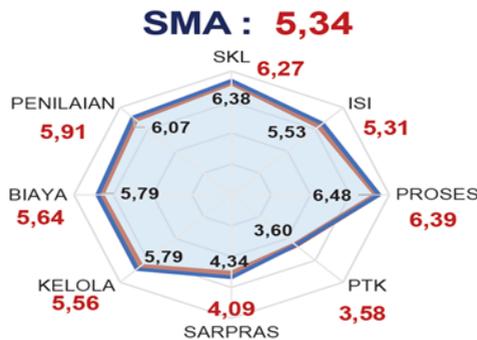
Tabel 2 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Neraca Pendidikan Provinsi Papua Barat tahun 2019. Dari gambar tersebut terlihat bahwa partisipasi penduduk di provinsi Papua Barat lebih tinggi di jenjang pendidikan SD dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Data BPS (2019) juga menunjukkan hal yang sama, dimana APM untuk jenjang pendidikan SD lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang lain dan yang paling rendah adalah di jenjang pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak anak yang termasuk kategori usia pada jenjang pendidikan SMA sederajat yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMA. Faktor-faktor penyebab tidak/melanjutkan pendidikan tersebut dapat berupa faktor geografi, lokasi sekolah, faktor kesadaran/motivasi masyarakat, faktor kondisi sosial ekonomi dan juga faktor keberadaan sekolah.

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2018	2019	2018	2019
SD/MI	93,66	93,76	110,72	111,24
SMP/MTs	69,11	69,92	89,68	88,49
SMA/SMK/MA	63,11	63,15	90,74	96,41

Sumber : Sumber: BPS (2020)

Standar satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Pelaksanaan 8 standar pelayanan minimum pendidikan SMA di Papua Barat digambarkan dalam Neraca Pendidikan Papua Barat tahun 2019, seperti pada Gambar berikut ini :



Gambar 4. Pelaksanaan 8 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tingkat SMA di Provinsi Papua Barat

Gambar 4 menunjukkan bahwa pencapaian tertinggi dari pelaksanaan 8 SPM tingkat pendidikan SMA di Provinsi Papua Barat adalah pada Standar Proses dengan skor yang diperoleh 6,39, sedangkan skor terendah adalah pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3,58). Nilai yang diperoleh ini rata-rata masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat masih jauh dari yang diharapkan. Kualitas yang dimaksud

adalah penyelenggaraan pendidikan mulai dari kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, penyelenggaraan kurikulum, proses belajar mengajar, kelengkapan sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, penilaian hasil belajar dan standar kelulusan siswa.

2. 3 Kebutuhan atau urgensi pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara

Tujuan SMA Taruna Kasuari Nusantara dibangun selain mempersiapkan siswa untuk dapat diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan internasional serta perguruan tinggi kedinasan, juga membangun karakter melalui kurikulum umum dan kurikulum khusus. Kurikulum umum yang dimaksud adalah kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kurikulum K-13, sementara kurikulum khusus adalah pendidikan kebudayaan, kepemimpinan, bela negara, dan wawasan lingkungan. Hal ini menjadi ciri khas dari sekolah ini mengingat kebutuhan di pasar kerja bukan saja tenaga kerja dengan kualitas kognitif yang baik, tetapi juga karakter yang berkualitas. Karakter yang dimaksud adalah kemampuan untuk disiplin dan juga memimpin, menghargai keberagaman suku dan budaya di nusantara serta berwirausaha. Karakter ini akan bertumbuh jika ada pembinaan yang baik dan terus menerus dan hanya dapat dilakukan melalui pendidikan berpola asrama.

Oleh karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat memutuskan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di provinsi ini mulai dari jenjang Sekolah Menengah Atas. Keputusan untuk memulai pendidikan karakter mulai dari jenjang SMA karena lulusan SMA akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Di Indonesia umumnya Perguruan Tinggi yang berkualitas berada di luar Provinsi Papua Barat. Hal ini berarti lulusan SMA akan hidup terpisah dari orang tua dan sistem sosialnya, sehingga perlu bekal untuk beradaptasi baik dengan lingkungan baru.



Untuk Membangun Sumber Daya Manusia
di Papua Barat Tidak ada Istilah

Tidak ada Rotan Akar pun Jadi

“ROTAN TETAP HARUS ROTAN”

(Drs. Dominggus Mandacan)

KERANGKA PENULISAN

Naskah studi kelayakan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat disusun dengan menggunakan metode Desk Study, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi publik. Selain itu, untuk mengetahui tingkat kelayakan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat dilakukan dengan metode perbandingan.

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan berbagai peraturan dan data yang terkait dengan pendirian sekolah menengah atas (SMA). Sementara FGD dengan berbagai pihak



Gambar 5. Proses dan tahapan penyusunan dokumen studi kelayakan

dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mendapat arahan serta masukan dari berbagai pihak, seperti Gubernur Papua Barat, Asisten 3 Provinsi Papua Barat, Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dan SMA Taruna Nusantara di Magelang. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang



Pertemuan Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Domingus Mandacan bersama Tim Kerja SMA Unggulan Papua Barat dengan penanggung jawab Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) di Jakarta, 25 Agustus 2020

pendirian SMA Unggulan, telah dilakukan kunjungan lapangan ke SMA Taruna Nusantara Magelang sebanyak dua kali. Konsultasi publik dilakukan dengan Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Otsus dan Komisi Pendidikan, dan juga masyarakat di sekitar lokasi SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat untuk mengetahui dukungan terhadap pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kelayakan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat dilakukan dengan metode perbandingan antara standar dengan kondisi eksisting terhadap tujuh aspek utama, yaitu: aspek input siswa, aspek kurikulum, aspek guru/pamong dan aspek tenaga kependidikan, aspek pembiayaan, aspek sarana prasarana, aspek kelembagaan, dan aspek persepsi masyarakat. Secara terinci aspek yang diperbandingkan ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Aspek, Parameter dan Indikator

Aspek	Parameter	Indikator	
		Tidak Layak	Layak
a. Input siswa	Jumlah lulusan SMP/MTs berkualitas	Jumlah lulusan berkualitas lebih kecil dari 72	Jumlah lulusan berkualitas lebih besar dari 72
	Jumlah SMP terakreditasi A dan B min. 8 sekolah	Jumlah SMP terakreditasi A dan B kurang dari 8 sekolah	Jumlah SMP terakreditasi A dan B min. 8 sekolah
b. Kurikulum	Kurikulum Nasional K13	Tidak menerapkan kurikulum K13	Menerapkan kurikulum K13
c. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan	Guru umum min. 13 orang	Guru umum kurang dari 13 orang	Guru umum min. 13 orang
	Guru khusus min. 4 orang	Guru khusus kurang dari 4 orang	Guru khusus min. 4 orang
	Tenaga kependidikan min. 1 orang	Tidak ada tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan min. 1
d. Keuangan (Pembiayaan Pendidikan)	Sumber pendanaan	Sumber pendanaan tidak jelas	Sumber pendanaan jelas
	Pertumbuhan pendapatan daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah negatif	Pertumbuhan pendapatan daerah positif
	Dukungan regulasi	Tidak ada dukungan regulasi	Ada dukungan regulasi



Diskusi lanjutan antara Tim Kerja SMA Unggulan Papua Barat sekaligus survey lokasi pendidikan SMA Taruna Nusantara (SMATN) di Magelang, Jawa Barat, 26 Agustus 2020

e. Sarana prasarana	Ketersediaan lahan minimal seluas 1340 m2	Tidak tersedia	Tersedia
	Ketersediaan ruang kelas min. 3 unit	Tersedia ruang kelas kurang dari 3 unit	Tersedia ruang kelas min. 3 unit
	Ketersediaan ruang guru min. 1 unit	Tidak tersedia ruang guru	Tersedia ruang guru min. 1 unit
	Ketersediaan laboratorium min. 2 unit*)	Tersedia laboratorium kurang dari 2 unit	Tersedia laboratorium min. 2 unit
	Ketersediaan ruang Tata Usaha min. 1 unit	Tidak tersedia ruang tata usaha	Tersedia ruang tata usaha min. 1 unit
	Ketersediaan perpustakaan min. 1 unit/ruang	Tidak tersedia perpustakaan	Tersedia perpustakaan min. 1 unit/ruang
	Ketersediaan papan tulis min. 5 unit	Tersedia papan tulis kurang dari 5 unit	Tersedia papan tulis min. 5 unit
	Ketersediaan meja/kursi belajar siswa min. 216 unit	Tersedia meja/kursi kurang dari 216 unit	Tersedia meja/kursi min. 216 unit
	Ketersediaan meja/kursi untuk guru dan tendik min. 18 unit	Tersedia meja/kursi kurang dari 18 unit	Tersedia meja/kursi min. 18 unit
	Ketersediaan asrama siswa min. 2 unit**)	Tersedia asrama siswa kurang dari 2 unit	Tersedia asrama siswa min. 2 unit
	Ketersediaan rumah dinas pamong min. 3 unit***)	Tersedia rumah dinas pamong kurang dari 3 unit	Tersedia rumah dinas pamong min. 3 unit
	Ketersediaan ruang makan min. 1 unit	Tidak tersedia ruang makan	Tersedia ruang makan min. 1 unit
	Ketersediaan toilet min. 7 unit****)	Tersedia toilet kurang dari 7 unit	Tersedia toilet min. 7 unit
	Ketersediaan dapur min. 1 unit	Tidak tersedia dapur	Tersedia dapur min. 1 unit

f. Kelembagaan	Ketersediaan kepala sekolah	Tidak tersedia kepala sekolah	Tersedia kepala sekolah
	Ketersediaan min. 1 wakil kepala sekolah	Tidak ada wakil kepala sekolah	Tersedia min. 1 orang wakil kepala sekolah
	Ketersediaan kepala tata usaha (KTU) min. 1 orang	Tidak ada kepala tata usaha	Tersedia min. 1 orang kepala tata usaha
	Ketersediaan kepala laboratorium min. 2 orang	Tersedia kepala laboratorium kurang dari 2 orang	Tersedia kepala laboratorium min. 2 orang
	Ketersediaan kepala perpustakaan min. 1 orang	Tidak tersedia kepala perpustakaan	Tersedia kepala perpustakaan min. 1 orang
	Ketersediaan wali kelas min. 3 orang	Tersedia wali kelas kurang dari 3 orang	Tersedia wali kelas min. 3 orang
g. Persepsi masyarakat	Dukungan dari dewan adat	Tidak ada dukungan dari dewan adat	Ada dukungan dari dewan adat
	Dukungan dari MRP	Tidak ada dukungan dari MRP	Ada dukungan dari MRP
	Dukungan dari DPR Fraksi Otsus, Komisi Pendidikan	Tidak ada dukungan dari DPR Fraksi Otsus, Komisi Pendidikan	Ada dukungan dari DPR Fraksi Otsus, Komisi Pendidikan
	Dukungan dari masyarakat sekitar lokasi SMA Unggulan	Tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar lokasi SMA Unggulan	Ada dukungan dari masyarakat sekitar lokasi SMA Unggulan

Keterangan:

*) Laboratorium IPA terpadu dan Laboratorium komputer

**) Asrama putra dan putri

***) Jumlah pamong 1 orang per kelas

****) Kebutuhan toilet: kantor = 1 unit, kelas = 3 unit, asrama = 3 unit

Penentuan tingkat kelayakan untuk pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat dilakukan dengan menghitung persentasi indikator yang layak (sebanyak 33 parameter) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat kelayakan (\%)} = \frac{\Sigma \text{Indikator layak}}{\text{Total indikator}} \times 100$$



Rapat kerja penyusunan dokumen kajian pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara

Tabel 4. Kriteria Penilaian

Nilai tingkat kelayakan	Keterangan
$\geq 95\%$	SMA Taruna Kasuari Nusantara layak didirikan
80–94 %	SMA Taruna Kasuari Nusantara layak didirikan dengan mempertimbangkan parameter prioritas
$< 80\%$	SMA Taruna Kasuari Nusantara tidak layak didirikan



**Untuk Membangun Sumber Daya Manusia
di Papua Barat Tidak ada Istilah
Tidak ada Rotan Akar pun Jadi
“ROTAN TETAP HARUS ROTAN”
(Drs. Domingus Mandacan)**

ASPEK KELAYAKAN

4.1 Input Siswa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi pembelajaran adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, pembelajaran dapat pula diartikan sebagai kegiatan guru untuk mengajar atau membimbing siswa menuju proses pendewasaan diri. Proses pendewasaan di sini bermakna proses belajar yang tidak semata-mata hanya menyampaikan materi (transfer of knowledge) saja, namun juga menyampaikan nilai-nilai (transfer of value) dari materi yang diajarkan sehingga para siswa tidak saja pandai tapi juga menjadi lebih dewasa.

Secara umum, terdapat tiga kelompok dalam proses pembelajaran, yaitu: (1) Pembelajaran dalam pengertian kuantitatif, yaitu berkaitan dengan jumlah materi dalam pembelajaran, dimana lebih menekankan pada proses penuluran atau penyampaian materi pelajaran atau pengetahuan sebanyak mungkin dari guru kepada para siswa; (2) Pembelajaran dalam pengertian kualitatif, yaitu berkaitan dengan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan, dimana lebih menekankan pada upaya guru dalam mempermudah siswa melakukan aktivitas belajar serta tingkat kebermanfaatan materi pelajaran pada para siswa; (3) Pembelajaran dalam pengertian institusional, yaitu berkaitan dengan bagaimana kemampuan guru dalam melakukan penataan dan mengorganisasikan pembelajaran termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran, dimana secara institusional pembelajaran dituntut untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh guru.

Di dalam proses pembelajaran, setidaknya terdapat tiga faktor penting, yaitu guru sebagai tenaga pendidik, siswa sebagai peserta didik, dan sarana prasarana sebagai faktor pendukung proses belajar mengajar. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu sama lainnya. Selain guru, peserta didik juga merupakan faktor dominan dalam pendidikan secara umum, karena inti dari proses pembelajaran adalah bagaimana merubah tingkah laku peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depannya. Dengan demikian maka peserta didik adalah individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh para guru.

Berdasarkan data BPS (2020), terdapat 334 SMP umum dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Papua Barat (Tabel 5), dimana Kabupaten Sorong memiliki jumlah SMP terbanyak (53 sekolah) dan kemudian diikuti oleh Kabupaten Manokwari dan Raja Ampat masing-masing sebanyak 39 sekolah, Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 34 sekolah, dan Kota Sorong sebanyak 33 sekolah, sementara Kabupaten Manokwari Selatan memiliki SMP/MTs yang paling sedikit yaitu sebanyak 8 sekolah. Dari sejumlah SMP/MTs tersebut sebanyak

Tabel 5. Jumlah SMP/MTs per Kabupaten di Papua Barat Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	SMP	MTs	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1.	Sorong	44	9	53	15,8
2.	Manokwari	37	2	39	11,6
3.	Raja Ampat	35	4	39	11,6
4.	Teluk Bintuni	33	1	34	10,2
5.	Kota Sorong	33	-	33	9,9
6.	Fakfak	22	4	26	7,8
7.	Sorong Selatan	23	2	25	7,5
8.	Kaimana	17	1	18	5,4
9.	Teluk Wondama	16	1	17	5,2

10.	Tambrauw	15	-	15	4,5
11.	Pegunungan Arfak	14	-	14	4,2
12.	Maybrat	13	-	13	3,9
13.	Manokwari Selatan	8	-	8	2,4
TOTAL		310	24	334	

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Tahun 2020

Tabel 6. Status Akreditasi SMP/MTs per Kabupaten di Papua Barat 2020

No.	Kabupaten	Akreditasi				Terakreditasi A dan B
		A	B	C	Belum	
1.	Sorong	6	20	13	0	26
2.	Manokwari	10	11	16	0	21
3.	Kota Sorong	11	8	11	1	19
4.	Teluk Bintuni	8	11	13	0	19
5.	Fakfak	5	8	4	3	13
6.	Raja Ampat	4	9	17	0	13
7.	Sorong Selatan	3	9	8	0	12
8.	Kaimana	4	7	5	0	11
9.	Maybrat	0	6	7	0	6
10.	Teluk Wondama	0	4	7	0	4
11.	Tambrauw	0	3	6	0	3
12.	Manokwari Selatan	0	3	5	0	3
13.	Pegunungan Arfak	0	1	10	0	1
PAPUA BARAT		51	100	122	4	151

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2020

Dalam tiga tahun terakhir, dari seluruh SMP/MTs di Papua Barat rata-rata meluluskan sebanyak 15.342 siswa (Tabel 7), dan dari jumlah tersebut rata-rata hanya sebanyak 11.877 siswa (77,4%) yang dapat terserap di SMA, MA, dan SMK di Papua Barat (Tabel 8).

Tabel 7. Jumlah Lulusan Siswa SMP/MTs Pada Tiga Tahun Terakhir di Papua Barat

Kabupaten	Lulusan Tahun Pelajaran		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Manokwari	2.608	2.720	2.820
Kota Sorong	3.429	3.612	3.507
Sorong	1.673	1.878	1.968
Fakfak	1.413	1.488	1.573
Teluk Wondama	547	597	635
Teluk Bintuni	958	1.054	1.075
Raja Ampat	924	972	1.164
Sorong Selatan	790	881	853
Kaimana	852	834	895
Tambrauw	291	326	314
Maybrat	311	364	372
Manokwari Selatan	382	371	408
Pegunungan Arfak	337	371	459
Papua Barat	14.515	15.468	16.043
Rata-rata		15.342	

Sumber: Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud (<https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>)

Tabel 8. Daya Serap SMA, MA, dan SMK di Provinsi Papua Barat

Kabupaten	Lulusan Tahun Pelajaran		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Manokwari	2.277	2.270	2.458
Kota Sorong	3.267	3.433	3.638
Sorong	1.222	1.360	1.411
Fakfak	974	1.035	1.103
Teluk Wondama	303	333	356
Teluk Bintuni	627	734	737
Raja Ampat	551	587	688
Sorong Selatan	507	585	618
Kaimana	639	600	625
Tambrauw	213	169	213

Maybrat	173	185	209
Manokwari Selatan	223	296	247
Pegunungan Arfak	163	322	280
Papua Barat	11.139	11.909	12.583
Rata-rata		11.877	

Sumber: Data diolah dari Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud (<https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>)

Berdasarkan rencana operasionalnya pada 6 tahun ajaran pertama, SMA Taruna Kasuari Nusantara akan menerima sebanyak 72 siswa untuk 3 rombongan belajar (Rombel), dan kemudian akan meningkat menjadi 120 siswa (5 Rombel) di tahun ke-7 (Tahun Ajaran 2027/2028) dan selanjutnya meningkat di tahun ke-10 hingga tahun ke-25 menjadi 168 siswa baru (7 Rombel) setiap tahunnya. Detail mengenai daya tampung dan rencana penerimaan siswa SMA Taruna Kasuari Nusantara selama 25 tahun disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Daya Tampung Siswa Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat

Tahun ke-	Tahun Ajaran	Daya Tampung Siswa	Rombongan Belajar (Rombel)		
			Total	IPA	IPS
1 s/d 3	2021/2022 s/d 2023/2024	72	3	3 rombongan pria	-
4 s/d 6	2024/2025 s/d 2026/2027	72	3	3 rombongan (2 rombongan pria & 1 rombongan wanita)	-
7 s/d 9	2027/2028 s/d 2029/2030	120	5	3 rombongan (2 rombongan pria & 1 rombongan wanita)	2 rombongan (1 rombongan pria & 1 rombongan wanita)
10 s/d 25	2030/2031 s/d 2045/2046	168	7	5 rombongan (3 rombongan pria & 2 rombongan wanita)	2 rombongan (1 rombongan pria & 1 rombongan wanita)

Berdasarkan data daya serap lulusan SMP/MTs di Papua Barat menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3.465 siswa (22,6%) dari total 15.342 siswa lulusan SMP/MTs di Papua Barat yang belum terserap oleh SMA/MA. Hal ini menginformasikan bahwa masih tersedia calon siswa dalam jumlah yang cukup untuk pendirian SMA atau yang sederajat. Selain itu, apabila dari setiap SMP/MTs yang ada di Papua Barat (334 SMP/MTs) hanya diambil siswa peringkat 1 sampai dengan 5 saja maka akan tersedia sebanyak 1.670 calon siswa SMA Taruna Kasuari Nusantara. Atau jika hanya diambil siswa peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 dari setiap SMP/MTs di Papua Barat yang terakreditasi A dan terakreditasi B saja maka akan tersedia sebanyak 755 calon siswa potensial. Dengan demikian dari aspek input siswa untuk pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di Papua Barat adalah layak.



Kunjungan Asisten Setda Papua Barat Bidang Administrasi Umum bersama tim kerja SMA Taruna Kasuari Nusantara didampingi oleh Kepala sekolah SMATN Magelang

4.2 Kurikulum

SMA Taruna Kasuari Nusantara didirikan untuk mengatasi disparitas bidang pendidikan di Indonesia dan guna melakukan akselerasi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan, khususnya pada tingkatan sekolah menengah atas. SMA Taruna Kasuari Nusantara menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berpola asrama. Untuk itu perlu didukung oleh kurikulum yang mampu mencapai tujuan pendidikan dan mampu mengikuti perubahan paradigma pendidikan serta dapat selaras dengan perubahan zaman.

SMA Taruna Kasuari Nusantara dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kurikulum umum dan kurikulum khusus SMA Taruna Kasuari Nusantara. Kurikulum umum mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum khusus diadopsi dan dimodifikasi dari kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara di Magelang.

4.2.1 Tujuan kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan di SMA Taruna Kasuari Nusantara menurut kurikulum umum dan kurikulum khusus dijabarkan pada kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran minat. Selain mata pelajaran kurikulum 2013, SMA Taruna Kasuari Nusantara menerapkan empat mata pelajaran kurikulum khusus.

Kelompok mata pelajaran wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan menengah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, dan sikap sebagai bangsa. Tujuan lain dari kelompok mata pelajaran wajib adalah memberikan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi peserta didik, pengenalan lingkungan fisik dan alam, kebugaran jasmani, serta seni budaya daerah dan nasional.

Mata pelajaran wajib pada kurikulum terbagi dua kelompok yaitu kelompok wajib A dan kelompok wajib B. Kelompok wajib A dan B sebagai pendidikan umum. Tujuan kelompok wajib A untuk membina sikap, pengetahuan dan

ketrampilan sebagai warga negara. Tujuan kelompok wajib B mengembangkan kemampuan budaya, olahraga dan keterampilan. Kelompok wajib B merupakan bagian yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kemampuan jasmani.

Tujuan mata pelajaran kelompok C yaitu mengembangkan potensi, minat dan bakat siswa guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ada dua kelompok peminatan (kelompok C) yaitu minat matematika dan ilmu-ilmu alam (C1) dan minat ilmu-ilmu sosial (C2). Pencapaian kompetensi kelompok minat didasarkan dari masing-masing tujuan kedua minat tersebut. Tujuan minat matematika dan ilmu-ilmu alam (C1) membekali dan melengkapi siswa untuk memiliki kemampuan dalam bidang Matematika dan ilmu-ilmu alam. Tujuan minat ilmu-ilmu sosial (C2) membekali dan melengkapi siswa untuk memiliki kemampuan dalam bidang ilmu-ilmu sosial.

Tujuan kurikulum khusus (kelompok D) untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan wawasan lingkungan. Kelompok khusus ini sebagai pengembangan karakter dan kepribadian setiap peserta didik sebagai salah satu keunggulan di SMA Taruna Kasuari Nusantara, serta pengembangan kemampuan tentang pemahaman lingkungan dan pengelolaannya. Pencapaian tujuan kelompok khusus ini melalui pola pengajaran serta menekankan pola pengasuhan dan pelatihan.

4.2.2 Karakteristik Kurikulum

Karakteristik kurikulum SMA Taruna Kasuari Nusantara mengacu pada karakteristik kurikulum 2013 yang didasarkan pada Permendikbud No. 69 tahun 2013 dan kurikulum khusus. Kurikulum SMA Taruna Kasuari Nusantara dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
- b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
- c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
- d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

- e. Menumbuhkembangkan kemampuan dan ketrampilan kepemimpinan
- f. Memiliki mental idiologi dan jiwa kebangsaan yang tinggi yang ditunjukkan dengan rasa bangga sebagai anak Indonesia dan cinta tanah air Indonesia;
- g. Memiliki nilai juang dan jiwa nasionalisme yang tinggi dalam membentuk karakter pribadi dalam mengisi kemerdekaan dan menjunjung nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional;
- h. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
- i. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
- j. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

4.2.3 Landasan Kurikulum

Landasan kurikulum SMA Taruna Kasuari Nusantara berdasarkan Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Landasan kurikulum tersebut terdiri dari tiga landasan. Ketiga landasan tersebut meliputi landasan filosofis, landasan teoritis dan landasan yuridis.

Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum sangat menentukan kualitas peserta didik yang dicapai oleh kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum ini dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Landasan filosofi dari kurikulum SMA Taruna Kasuari Nusantara berdasarkan filosofi kurikulum 2013. Landasan filosofi tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu.

4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

Landasan Teoritis

Kurikulum SMA Taruna Kasuari Nusantara berbasis pada teori pendidikan berdasarkan standar (*standard-based education*), dan berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Prinsip kurikulum

Kurikulum SMA Taruna Kasuari Nusantara menganut dua prinsip, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan pengalaman belajar oleh siswa (peserta didik). Selain itu dalam kurikulum khusus dilaksanakan pola pengasuhan dan pola pelatihan. Pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses belajar yang dikembangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara intra sekolah dan ekstra sekolah. Kegiatan pembelajaran intra sekolah dapat dilakukan di sekolah (ekstra kelas) dan di dalam kelas (intra kelas). Kegiatan pembelajaran ekstra sekolah yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian kegiatan pembelajaran dilakukan di sekolah, di kelas, dan di lingkungan masyarakat.

Pengalaman belajar secara langsung dari peserta didik (*learned-curriculum*) yang sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal dari peserta didik. Pengalaman belajar secara langsung dari individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

Pola pengasuhan memberikan keleluasaan hubungan yang erat antara guru dan peserta didik. Hubungan ini memberikan gambaran kehidupan bersama

keluarga, sehingga peserta didik merasakan lingkungan keluarga. Peran guru memberikan keteladanan, membiasakan hal baik, memberikan nasehat, mendidik dan menerapkan kedisiplinan bagi peserta didik. Posisi guru menjadi orang tua bagi peserta didik. Dengan demikian peserta didik mampu menggali dan mengembangkan sikap dan perilaku yang baik dalam menunjang pendidikannya selama di sekolah.

Pola pelatihan merupakan kegiatan yang menempa dan membentuk kemampuan peserta didik untuk memiliki kemampuan dan kecakapan yang disesuaikan dengan kurikulum. Pola pelatihan dapat dilakukan di dalam dan di luar ruangan yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis SMA Taruna Kasuari Nusantara sejalan dengan landasan yuridis kurikulum 2013. Landasan yuridis tersebut adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.2.4 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi lulusan SMA Taruna Kasuari Nusantara memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kedua kompetensi ini diatur oleh Permendikbud No. 69 tahun 2013. Selanjutnya kompetensi tersebut dirumuskan ke dalam kurikulum umum dan kurikulum khusus.

Kompetensi Inti

Kompetensi inti sebagai pengikat dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang terstruktur. Ikatan tersebut mampu mewujudkan kemampuan pengorganisasian kompetensi dasar secara horisontal dan secara vertikal. Dengan demikian komponen inti menjadi alat yang mampu mengorganisasikan elemen pendidikan untuk mencapai keberhasilan peserta didik dalam memiliki kemampuan yang berkualitas. Kualitas peserta didik dapat dilihat dari kompetensi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Keterampilan yang diperoleh meliputi kemampuan mengelola emosional (afektif), kemampuan olah pikir (kognitif), dan kemampuan fisik (psikomotor). Kemampuan keterampilan tersebut didapat peserta didik selama proses belajar di kelas dan mata pelajaran, serta proses pembinaan karakter kepemimpinan. Kompetensi inti dirancang sejalan dan selaras dengan perkembangan usia peserta didik ketika belajar di kelas X, XI dan XII pada SMA Taruna Kasuari Nusantara. Dengan demikian kompetensi inti diharapkan mampu membawa peserta didik mencapai kemampuan yang berkualitas secara seimbang antara pencapaian pengetahuan akademik dan sikap.

Kompetensi inti tertuang pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti tersusun atas empat kelompok kompetensi yang memiliki hubungan erat dan terikat. Keempat kompetensi inti (KI) tersebut terdiri atas yaitu

1. Kompetensi inti sikap spritual (KI-1),
2. Kompetensi inti sikap sosial (KI-2),
3. Kompetensi inti pengetahuan (KI-3),
4. Kompetensi inti ketrampilan (KI-4).

Selain kurikulum umum, SMA Taruna Kasuari Nusantara juga menerapkan kurikulum khusus. Kompetensi inti pada Kurikulum khusus juga mengacu kepada kompetensi inti yang bersumber dari Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Dengan demikian semua kompetensi inti pada kurikulum umum maupun kurikulum khusus mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut.

Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar sangat terikat oleh kompetensi inti yang berperan sebagai unsur pengorganisasian. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar sebagai unsur-unsur yang mutlak ada dalam mendukung kompetensi inti. Komponen dasar terorganisasi secara vertikal maupun secara horisontal oleh kompetensi inti.

Pengorganisasian kompetensi dasar secara vertikal sejalan dengan terjadinya interaksi penerapan setiap isi komponen dasar. Penerapan kompetensi dasar tersebut didasarkan dari kelas di bawahnya ke kelas di atasnya yang

membentuk akumulasi yang berjenjang dan berkelanjutan dari setiap isi yang telah dipelajari oleh setiap peserta didik selama menempuh pendidikan di SMA Taruna Kasuari Nusantara. Proses tersebut diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII.

Pengorganisasian kompetensi dasar secara horisontal membentuk lapisan-lapisan isi dari kompetensi dasar tersebut. Lapisan yang terbentuk itu saling menguatkan dan mengokohkan setiap isi kompetensi dasar. Hal ini terjadi melalui proses pembelajaran setiap mata pelajaran yang diikuti setiap peserta didik saat pertemuan tatap muka selama satu minggu berjalan di setiap kelasnya.

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar (KD) dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti (KI) sebagai berikut:

1. Kelompok KD-1: Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
2. Kelompok KD-2: Kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
3. Kelompok KD-3: Kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
4. Kelompok KD-4: Kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

Pengelompokan kompetensi dasar untuk kurikulum umum didasarkan pada. Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Sedangkan kompetensi dasar untuk kurikulum khusus didasarkan dan dirumuskan melalui pengkajian terhadap kurikulum khusus dari SMA Taruna Nusantara di Magelang.

4.2.5 Kerangka Kurikulum

SMA Taruna Kasuari Nusantara melakukan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum umum dan kurikulum khusus. Mata pelajaran yang diselenggarakan berdasarkan kurikulum tersebut memuat sebanyak 19 mata pelajaran setiap semester pada tiap tingkatan kelas.

Kurikulum umum yang digunakan yaitu kurikulum nasional tingkat SMA/MA yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur kurikulum utama yang akan dipergunakan oleh SMA Taruna Kasuari Nusantara berdasarkan pada kurikulum 2013. Kurikulum utama selanjutnya disebut sebagai kurikulum umum. Kurikulum umum merupakan kurikulum yang didasarkan pada Permendikbud No 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Kurikulum umum ini terdiri atas mata pelajaran kelompok wajib dan kelompok minat atau pilihan. Mata pelajaran kelompok wajib terdiri atas mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B. Mata pelajaran kelompok wajib terdiri atas 11 mata pelajaran. Mata pelajaran kelompok peminatan sebagai mata pelajaran kelompok C. mata pelajaran kelompok minat untuk masing-masing minat sebanyak empat mata pelajaran.

Selain kurikulum tersebut diterapkan juga kurikulum khusus. Kurikulum ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan setiap peserta didik. Kurikulum khusus terdiri atas mata pelajaran kelompok D. Mata pelajaran kelompok D terdiri atas empat mata pelajaran.

Nama enam mata pelajaran kelompok A yaitu:

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2. Pendidikan Pancasila dan Kewargaannegara
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Sejarah Indonesia
6. Bahasa Inggris

Nama tiga mata pelajaran kelompok B yaitu:

1. Seni Budaya
2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan
3. Prakarya dan Kewirausahaan

Nama empat mata pelajaran peminatan Matematika dan ilmu-ilmu alam yaitu:

1. Matematika
2. Biologi
3. Fisika
4. Kimia

Nama mata pelajaran pilihan wajib yaitu:

1. Informatika
2. Bahasa Asing (Inggris, Cina, Arab, Prancis, dll)

Nama empat mata pelajaran kurikulum khusus (kelompok D) yaitu:

1. Budaya Papua dan Nusantara
2. Keanekaragaman Sumber Daya Alam Papua
3. Kepemimpinan dan pengorganisasian
4. Wawasan Kenusantaraan dan Bela Negara



Dr. Mky Sagrim (kemeja putih) dan Prof. Dr. Charlie D. Heatubun ketika mengikuti rapat tim kerja penyusunan dokumen kajian pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat

Tabel 10. Struktur Kurikulum (Mata Pelajaran dan Jam Belajar)

Mata Pelajaran		Jam Belajar /minggu/semester		
		X	XI	XII
Kurikulum Umum				
Kelompok A (Wajib)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewargaanegara	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				
7.	Seni Budaya	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu		24	24	24
Kelompok C (Peminatan)				
C.I. Peminatan Akademik Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam				
1.	Matematika	3	4	4
2.	Biologi	3	4	4
3.	Fisika	3	4	4
4.	Kimia	3	4	4
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok C.I.		12	16	16
Kelompok D Pilihan Wajib				
1.	Informatika	3	3	3
2.	Bahasa Asing (Inggris, Cina, Arab, Prancis, dll)	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok D		5	5	5
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu (Kelompok A + B + C + D)		41	45	45
Kurikulum Khusus (Kelompok E)				
1.	Budaya Papua dan Nusantara	2	2	2
2.	Keanekaragaman Sumber Daya Alam Papua	2	2	2
3.	Kepemimpinan dan pengorganisasian	2	2	2

4.	Wawasan Kenusantaraan dan Bela Negara	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok E		8	8	8
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu (Kelompok A + B + C + D + E)		49	53	53
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu (Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA)		68	72	72

4.2.6 Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. Beban belajar di SMA Taruna Kasuari Nusantara dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu.
 - a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 49 jam pembelajaran.
 - b. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah 53 jam pembelajaran.
2. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
3. Beban belajar di Kelas X dan XI dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
4. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
5. Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
6. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

4.2.7 Dukungan kurikulum

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum menyatakan bahwa komponen kurikulum meliputi (A) visi, misi dan tujuan, (B) muatan kurikulum, (C) pengaturan pembelajaran dan (D) kalender pendidikan. Menurut Baderiah, (2018), menyatakan bahwa komponen kurikulum terdiri atas tujuan, materi, organisasi kurikulum dan evaluasi. Komponen kurikulum dalam pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara memiliki komponen-komponen yang mendukung kurikulum seperti visi, misi, dan tujuan; kerangka dan struktur kurikulum; dan beban belajar; serta selanjutnya dapat dirumuskan dan dirancang komponen pendukung lainnya.

Dalam perjalanannya pelaksanaan kurikulum pada SMA Taruna Kasuari Nusantara perlu dilakukan validasi kurikulum atau dilakukannya evaluasi dan mentoring yang dilanjutkan dengan penyempurnaan kurikulum. Kegiatan dalam validasi kurikulum ini dilakukan minimal pada angkatan pertama, selama kegiatan evaluasi dan mentoring secara terus menerus. Berdasarkan hasil evaluasi dan mentoring ini maka diadakan penyempurnaan kurikulum. Evaluasi terhadap kurikulum yang diberlakukan untuk mengetahui kelemahan, kekurangan dan hambatan yang dihadapi, dari hal-hal tersebut selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap kurikulum yang berlaku sebelumnya. Penyempurnaan kurikulum tersebut selanjutnya akan diimplementasikan pada angkatan berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan kerja sama dalam pendirian, pelaksanaan dan pendampingan selama awal-awal pengembangan SMA Taruna Kasuari Nusantara dengan pihak SMA Taruna Nusantara Magelang.

Implementasi dari kurikulum bagi peserta didik mengarahkan untuk pencapaian tujuan dari pembelajaran dan pencapaian standar kompetensi lulusan, baik kompetensi inti pada setiap tingkatan kelas maupun kompetensi dasar dari setiap materi matapelajara yang diberikan. Penerimaan materi dari setiap mata pelajaran dalam proses pembelajar di kelas merupakan kegiatan pokok intrakurikuler. Kapasitas kemampuan peserta didik dalam kegiatan pokok intrakurikuler, jika belum mencapai kemampuan yang optimal maka perlu dilakukan upaya dalam peningkatan kapasitas kemampuannya. Kemampuan peserta didik di SMA Taruna Kasuari Nusantara didasarkan standar kompetensi kelulusan, pada penerimaan periode awal ini dititikberatkan pada mata pelajaran peminatan akademik matematika dan ilmu-ilmu alam, serta bahasa Inggris. Peningkatan kemampuan kapasitas tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan pokok kokurikuler yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan peserta didik pada kemampuan matematika dan ilmu-ilmu alam.

Kegiatan pokok intrakurikuler dikuatkan secara langsung oleh kegiatan pokok kokurikuler. Kegiatan pokok kokurikuler disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan mata pelajaran, khususnya mata pelajaran MIPA dan Bahasa Inggris. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu, kelompok/grup belajar atau rombongan belajar (rombel). Pelaksanaan kegiatan pokok kokurikuler dilakukan di luar jam pembelajaran. Bentuk kegiatan pokok Kokurikuler dapat berupa kegiatan Matrikulasi, Kursus, Belajar individu, Belajar kelompok, Forum diskusi maupun sistem pola asuh

dengan guru. Kegiatan matrikulasi dilakukan guna memperkecil kesenjangan dan menyamakan kemampuan peserta didik yang datang dari berbagai daerah di Papua Barat dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. Pelaksanaan kegiatan matrikulasi ini harus dilakukan dengan baik dan terukur, yang dimulai secara terencana, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terarah dan terprogram, serta dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya. Kegiatan matrikulasi sebaiknya dilaksanakan di fase awal sebelum dimulainya proses pembelajaran kelas X, dapat diprogram pelaksanaannya pada bulan Juni-Juli 2021. Selain peningkatan kemampuan sesuai kompetensi lulusan peserta didik harus memiliki karakter yang berintegritas tinggi. Kemampuan ini selain dari kedua kegiatan pokok di atas dapat ditempa juga lewat kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat dan minat siswa didik serta adanya pelatihan-pelatihan yang memperkuat karakter tersebut.

4.2.8 Penilaian kelayakan

Kelayakan kurikulum pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara dinyatakan layak yang ditunjukkan oleh penggunaan kurikulum SMA/MA yang berlaku secara nasional yaitu kurikulum 2013 dan juga penggunaan kurikulum khusus, serta kelengkapan perangkatnya. Selain itu adanya dukungan beberapa aspek di dalam kurikulum tersebut dan adanya kegiatan yang memperkaya penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran guna mencapai keberhasilan peserta didik. Aspek-aspek tersebut meliputi :

1. Adanya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang tertuang dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar di setiap mata pelajaran.
2. Memiliki komponen-komponen yang mendukung kurikulum seperti visi, misi, dan tujuan; kerangka dan struktur kurikulum; dan beban belajar.
3. Penggunaan waktu pengajaran per minggu masih di bawah waktu maksimum pembelajaran per minggu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Kemampuan peserta didik dalam menguasai bidang ilmu matematika dan ilmu-ilmu alam, selain diperoleh melalui kegiatan pokok intrakurikuler diperkaya melalui kegiatan matrikulasi di fase awal sebelum dimulainya proses pembelajaran Kelas X dan kegiatan pokok kokurikuler.

4.3 Sumber Daya Manusia Guru dan Tendik

4.3.1 Pendidik Kurikulum Umum

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya maka sangat dibutuhkan sebuah Pendidikan yang profesional. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu guru sebagai pendidik dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan pelatihan serta melakukan penilaian atas hasil belajar siswa. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompeten sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan kurikulum. Berdasarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menyatakan bahwa kualifikasi dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran meliputi :

- Kompetensi Pedagogik. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan kompetensi lulusan yang diharapkan.
- Kompetensi Kepribadian. Memiliki kepribadian yang dewasa, berbudi pekerti luhur, tegas, disiplin, berwibawa, dan bijaksana.
- Kompetensi Profesional. Untuk memenuhi kompetensi profesional, diperlukan pendidikan minimal D-IV atau S-1.
- Kompetensi sosial. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga dicantumkan mengenai kualifikasi pendidik yang meliputi:

- Pendidikan minimum D-IV/S-1 sesuai mata pelajaran yang diampu
- Diperoleh dari program studi yang terakreditasi

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan di tahun ajaran 2019/2020 jumlah kepala sekolah dan guru SMA di Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 2.186 guru. Guru yang memiliki ijazah tertinggi \geq S1 sebanyak 2.020 atau 92,41% dan 166 guru atau 7,59% memiliki ijazah tertinggi $<$ S1. Guru yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.203 guru atau 55,03% dan 983 guru atau 44,97% berstatus sebagai guru Non PNS.

4.3.2 Pendidik pada kurikulum Khusus

Kurikulum khusus SMA Taruna Kasuari Nusantara dirancang terpisah dengan kurikulum umum dan disusun sedemikian rupa guna mencapai cita-cita pendidikan di SMA Taruna Kasuari Nusantara. Kurikulum khusus ini bertujuan untuk mencerdaskan peserta didik secara intelektualitas dan spiritualitas, yang meliputi kepribadian, watak/karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Kelompok mata pelajaran yang menjadi fokus Kurikulum Khusus terdiri dari Mata Pelajaran Budaya Papua dan Nusantara, Keanekaragaman Sumber Daya Alam Papua Barat, Kepemimpinan dan Pengorganisasian, dan Wawasan Nusantara dan Bela Negara.

Kualifikasi Pendidik Kurikulum Khusus meliputi:

1. Latar belakang pendidikan dengan program pendidikan keahlian yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya,
2. Mempunyai keahlian serta kompetensi tertentu sesuai mata pelajaran yang diampunya, dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat kompetensi yang mendukung keahliannya.

Pendidik setiap mata pelajaran tersebut berasal dari praktisi dengan keahlian tertentu dan anggota atau purnawirawan TNI/POLRI.

4.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pembelajaran Kurikulum Khusus SMA Taruna Nusantara. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah, kompetensi tenaga pendidik meliputi

1. Kompetensi kepribadianMemiliki integritas dan berakhlak mulia

- Memiliki etos kerja, rasa percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreativitas dan inovasi,
 - Mengendalikan diri
2. Kompetensi Sosial
- Dapat bekerja sama dalam tim
 - Memberikan layanan prima
 - Memiliki kemampuan berorganisasi
 - Berkomunikasi efektif
 - Membangun hubungan kerja
3. Kompetensi Teknis
- Melaksanakan administrasi kepegawaian
 - Melaksanakan administrasi keuangan
 - Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana
 - Melakukan administrasi hubungan dengan masyarakat
 - Melakukan administrasi persuratan dan pengarsipan
 - Melakukan administrasi kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus
 - Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

Kualifikasi Tenaga pendidikan meliputi:

Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

Data yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMA adalah sebanyak 332 pegawai dan 165 pegawai pada jenjang SMK yang tersebar di Papua Barat. Jumlah tenaga kependidikan terbanyak di Kabupaten Manokwari dan terendah di Kabupaten Maybrat. Sedangkan untuk jenjang SMK, jumlah tenaga kependidikan terbanyak di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Maybrat.

Tabel 11. Data Pegawai Provinsi Papua Barat - Dapodikdasmen

No.	Wilayah	SMA			SMK		
		Jml	L	P	Jml	L	P
1.	Kab. Manokwari	68	35	33	26	14	12
2.	Kab. Fak-Fak	25	13	12	8	3	5
3.	Kota Sorong	59	30	29	48	22	26
4.	Kab. Sorong	44	30	14	25	17	8
5.	Kab. Raja Ampat	33	23	10	10	8	2
6.	Kab. Teluk Bintuni	26	15	11	3	2	1
7.	Kab. Kaimana	16	10	6	11	8	3
8.	Kab. Sorong Selatan	10	6	4	6	3	3
9.	Kab. Teluk Wondama	7	4	3	5	2	3
10.	Kab. Tambrauw	12	9	3	9	7	2
11.	Kab. Maybrat	4	3	1	2	1	1
12.	Kab. Pegunungan Arfak	15	14	1	9	8	1
13.	Kab. Manokwari Selatan	13	8	5	3	1	2
	Total	332	200	132	165	96	69

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa pemenuhan jumlah tenaga kependidikan adalah 1 tenaga kependidikan per satuan pendidikan. Berdasarkan data pokok pendidikan rasio jumlah SMA/SMK di Provinsi Papua Barat dengan jumlah tenaga kependidikan adalah sebesar 1:3.

4.5 Analisis

Indikator yang digunakan untuk melihat kelayakan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara dari segi pendidik dan tenaga pendidikan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tersedia tenaga pendidik berkualifikasi minimal S1 sebanyak 92 % dari total guru SMA.
- b. Bersedianya Pamong yang berasal dari SMA Taruna Nusantara Magelang berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama.
- c. Tersedianya tenaga pendidik dari Praktisi dengan keahlian tertentu serta TNI dan/atau POLRI di Provinsi Papua Barat untuk mengajar kurikulum khusus.
- d. Rasio jumlah satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan di Papua Barat sebesar 1:3.

Berdasarkan indikator di atas maka pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara dari aspek tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah layak.

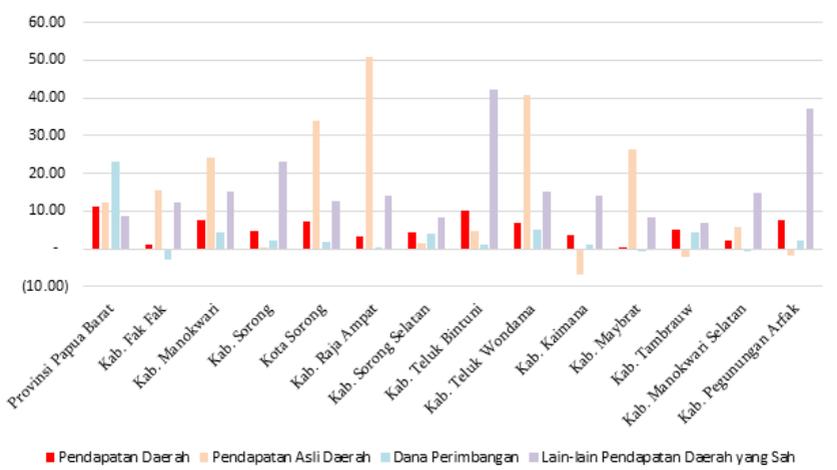
4.6 Pembiayaan Pendidikan

4.6.1 Pendapatan Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

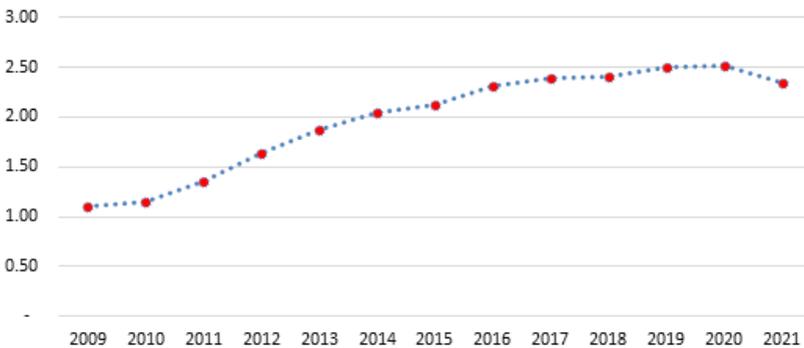
Sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari: (1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; (2) Penerimaan pinjaman daerah; (3) Dana cadangan daerah; dan (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kondisi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat menunjukkan rata-rata pertumbuhan 5,39 persen dalam periode (2016 – 2020). Rata-rata pendapatan tertinggi berada di kabupaten Bintuni sebesar 9,9 persen, sedangkan yang rata-rata terendah berada pada Kabupaten Maybrat sebesar 0,41 persen. Pada masa Covid-19 yang dimulai dari tahun 2019 hingga saat ini, dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Barat sebagian besar mengalami kontraksi, kecuali Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kontraksi pendapatan daerah terbesar dialami oleh Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebesar 21,66 persen. Hal ini lebih disebabkan karena harga komoditi gas bumi pada pasar internasional yang mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pendapatan daerahnya.



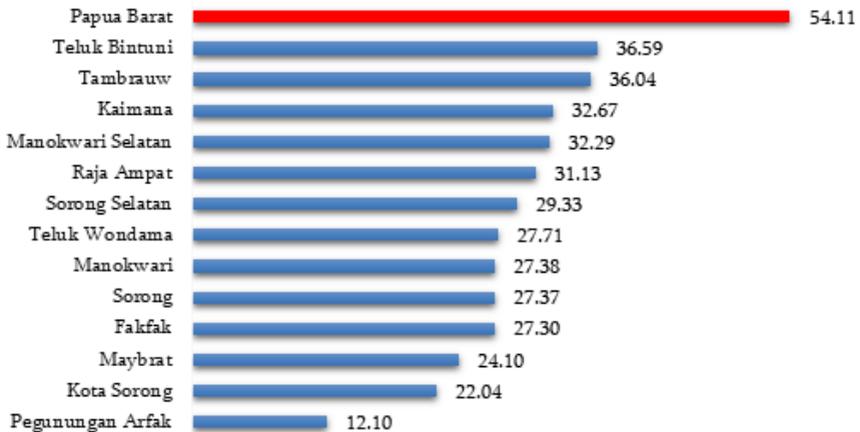
Gambar 6. Rata-rata Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

Salah satu sumber Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat yang bersifat asimetris adalah Dana Otonomi Khusus. Pendapatan yang bersifat asimetris berdasarkan pada beberapa hasil kajian memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi terutama pada penyediaan fasilitas publik (Watts, 2005; Solé-Ollé and Esteller-Moré, 2005; Garcia-Milà & McGuire, 2007). Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Provinsi Papua Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sejak awal diterima hingga saat ini (Gambar 8). Selama kurun waktu 13 Tahun terakhir (2009 – 2021), total alokasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp. 37,6 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 7,3 persen, yang terdiri dari Dana Otsus sebesar Rp. 25,45 Triliun dan DTI sebesar Rp.12,17 Triliun (DJPK Kemenkeu, 2021).



Gambar 7. Total Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat 2009 – 2021

Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari alokasi untuk bidang pendidikan. Alokasi bidang pendidikan dari dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 sebesar 54,11%. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan aturan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2019 yaitu biaya pendidikan minimum 25%. Namun, jika dilihat per kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat maka ada tiga wilayah yang mengalokasikan dana Otonomi Khusus bagi pendidikan terendah, yaitu Kabupaten Maybrat (24,10%), Kota Sorong (22,04%), dan Kabupaten Pegunungan Arfak (12,10%).



Gambar 8. Alokasi Pendidikan di Provinsi Papua Barat tahun 2019

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diamademen oleh Pemerintah RI dengan mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 menyebutkan bahwa "Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan

Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan”.

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Bagian Keempat angka 2 huruf d memandatkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk bersama-sama dengan Menteri Keuangan menyusun, mengoordinasikan, mengalokasikan, dan menetapkan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran, termasuk alokasi tambahan yang bersifat khusus dalam mendukung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja nonkementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta angka 3 huruf d memandatkan Menteri Keuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 pada Misi ke-3 yang berbunyi “Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan”.
7. Peraturan Gubernur Papua Barat No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaa, Penerimaan, dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

4.6.2 Analisis kelayakan

Indikator yang digunakan untuk melihat kelayakan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara pada pembiayaan pendidikan ada dua, yaitu: pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Daerah

Hasil analisis pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi

Papua Barat menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 5,39 persen dalam periode 2016 – 2020. Kondisi ini menunjukkan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara layak untuk dilanjutkan. Hal ini didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Pendapatan Daerah yang semakin meningkat dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara.
- b. Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara dapat memberikan multiplier effect bagi pendapatan daerah terutama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Peraturan perundang-undangan

Hasil analisis peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara layak untuk dilakukan karena adanya dasar hukum yang kuat dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan.



Rapat kerja tim penyusunan dokumen kajian pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat

4.7 Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara, harus diawali dengan pemenuhan kelengkapan prasarana oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai operator utama SMA dimaksud. Fasilitas yang harus dipenuhi berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar dan Sarana dan Prasarana Sekolah adalah fasilitas belajar mengajar, perpustakaan, dapur, asrama siswa, ruang makan, lapangan upacara, rumah guru, ruang kepala sekolah, ruang konseling, dan pegawai administrasi, kantin, pos keamanan, pagar pengaman lingkungan sekolah, sarana olahraga, rekreasi dan seni, kewirausahaan, peribadatan dan ruang terbuka hijau dan jalan.

4.7.1 Fasilitas Belajar Mengajar

a. Ruang Kelas

Jumlah dan ukuran minimal ruang kelas pada awal pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara disesuaikan dengan tiga faktor utama, yaitu rencana jumlah minimal siswa yang akan diterima, jumlah guru dan pegawai administrasi, sarana yang telah tersedia untuk digunakan. Ketentuan ini diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar dan Sarana dan Prasarana Sekolah.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menyediakan Fasilitas eks Balai Pelatihan Kehutanan (BLK) Maluku Papua sebagai bangunan sekolah. Jumlah siswa yang direncanakan pada awal operasional sekolah adalah 72 orang, terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel), masing-masing tiga rombel kelompok peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam. Setiap kelas diisi oleh maksimal 24 orang peserta didik. Jumlah guru yang direncanakan pada awal operasional sekolah adalah 21 orang (17 orang guru umum dan 4 orang guru khusus), dan satu orang tenaga administrasi Pendidikan.

Ruang kelas yang tersedia di eks BLK Manokwari berjumlah 3 ruangan, masing-masing berukuran 12 x 8,4 m atau 102 m². Setiap peserta didik dapat menempati luas ruang 4,25 m². Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), luas minimal ruang kelas adalah 30 m², lebar minimal 5 m, kapasitas maksimum 32 peserta didik per ruang kelas untuk 15 rombel. Dari kesesuaian ketersediaan ruang

kelas maka bangunan kelas yang tersedia di eks BLK Manokwari dianggap layak untuk dijadikan ruang belajar SMA Taruna Kasuari Nusantara.

Kapasitas kelas seperti yang telah dijelaskan, menurut pengamatan di lapangan dapat diatur oleh pihak operator sekolah untuk memenuhi prinsip-prinsip manajemen kelas ideal. Prinsip-prinsip manajemen kelas ideal menurut Loisell seperti yang disitasi Winiputra 2003; Karwari dan Priansa 2015 yaitu keluwesan pandang (visibilitas), mudah dicapai (aksesibilitas), keluwesan (fleksibilitas), kenyamanan meliputi pencahayaan, suhu udara, akustik, kepadatan kelas dan keindahan. Untuk mencapai semua prinsip-prinsip tersebut, semua ruang kelas dapat dilakukan rehabilitasi ruangan terutama jendela-jendela dan pintu kelas. Lokasi BLK Manokwari berada di pinggiran pantai, keindahan dan suhu udara ideal sudah tersedia. Namun faktor keamanan kawasan belajar perlu diperhatikan. Pemasangan pagar pembatas dan pembangunan pos keamanan perlu segera dilakukan, karena kawasan BLK terlalu dekat dengan pemukiman penduduk dan pada beberapa sisi tidak memiliki pagar yang representatif. Untuk memaksimalkan penertiban peserta didik selama masa belajar, perlu pengawasan ekstra ketat dari kepala asrama dan pihak keamanan.



Bangunan eks BLK Manokwari yang akan digunakan sebagai ruang kelas



Bangunan eks BLK Manokwari yang akan digunakan sebagai ruang kelas

b. Sarana Ruang Kelas

Perabot dalam kelas meliputi satu kursi dan satu meja per peserta didik. Satu kursi guru dan satu meja guru, satu buah lemari, satu buah papan panjang (minimal 60 x 120 cm), papan tulis (minimal 90 x 200 cm). Slide proyektor, dudukan proyektor, diusahakan dari merek terkenal, kuat dan mudah dioperasikan. Perlengkapan lain meliputi, tempat sampah, keset kaki, tempat cuci tangan, jam dinding, soket listrik dan papan slogan belajar (100 x 100 cm), gambar Garuda Pancasila, Presiden dan Wakil Presiden, Bendera Merah Putih, Tiang Bendera.

Kursi dan meja peserta didik, serta kursi dan meja guru harus kuat ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman, stabil, dan mudah dipindahkan. Lemari harus berukuran ideal untuk menyimpan semua perlengkapan kelas. Semua perabot kelas hingga saat ini belum dapat dipenuhi namun sedang dalam proses pengerjaan, sehingga diharapkan sudah tersedia dalam kondisi siap pakai sebelum awal pengoperasian sekolah. Dari hasil diskusi dengan pihak kontraktor yang menangani renovasi bangunan di kompleks BLK, diketahui bahwa semua bangunan akan sudah selesai dikerjakan pada tanggal 30 Mei 2021.

c. Laboratorium

Laboratorium IPA

Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, laboratorium harus dipisahkan antara Laboratorium Biologi, Fisika dan Kimia. Laboratorium standar untuk awal pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara adalah untuk mata ajaran Biologi, Kimia, Fisika, ditambah Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer. Pada awal operasional sekolah nanti, diharapkan telah tersedia bangunan representatif untuk dijadikan laboratorium. Fasilitas laboratorium terstandar akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar mengajar atau kurikulum yang berlaku.

Suatu laboratorium harus memenuhi tiga syarat yaitu kesehatan, keamanan kerja, rasa nyaman dan efisien energi (TSI Incorporated, 2010; Sisunandar 2015). Ukuran laboratoirum IPA standar adalah 90 m² untuk 30 peserta didik. Setiap Laboratorium harus memiliki ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Ruang persiapan sangat dianjurkan memiliki ukuran yang memadai sebagai tempat menyiapkan praktikum dan menyimpan alat dan bahan. Mengacu pada Piggot (2011) dan Sisunandar (2015) bahwa ruang preparasi minimal adalah 0,5 m² per peserta didik. Dengan demikian minimal luas yang diperlukan adalah $0,5 \times 24 \text{ peserta didik} \times 3 \text{ laboratorium} = 36 \text{ m}^2$. Umumnya 30 % peruntungannya digunakan untuk area kerja, 40 % untuk penyimpanan alat dan 30 % untuk sirkulasi (Piggott, 2011; Sisunandar, 2015).

Hasil tinjauan lapangan menunjukkan bahwa di kompleks eks BLK Manokwari tersedia tiga ruangan yang dapat dijadikan laboratorium Biologi, Fisika dan Kimia dan sedang dalam proses renovasi. Luas ruangan untuk laboratorium Kimia dan Biologi adalah 101,79 m², sedangkan untuk laboratorium Fisika telah tersedia ruangan 96 m². Dengan demikian ketersediaan ruang laboratorium untuk mata pelajaran IPA dianggap layak pada awal pendirian SMA Unggulan ini.

Fasilitas dalam Laboratorium IPA

Rekomendasi fasilitas yang perlu ada di laboratorium sains (Piggott 2011; Sisunandar 2015) adalah meja kursi, meja demonstrasi, lemari asam, lemari tas, listrik, air dan bak cuci serta fasilitas emergency (P3K). Lemari pendingin, lemari, lemari penyimpanan bahan mudah terbakar. Dessicator untuk menyimpan bahan beracun. Lemari khusus untuk menyimpan bahan toksik dan karsinogen. Perlengkapan yang perlu ada adalah jas lab, sarung

tangan, masker dan kaca mata pengaman (safety glasses). Apabila peralatan dan bahan-bahan praktikum siswa dan semua fasilitas belum tersedia maka akan dilakukan sharing laboratorium dengan SMA di Manokwari dan/atau Universitas Papua.

Laboratorium Komputer

Standar laboratorium komputer sesuai Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) menyatakan bahwa ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum setengah rombongan belajar (rombel). Rasio minimum ruang laboratorium komputer adalah 3 m² per peserta didik. Luas minimum laboratorium adalah 64 m² termasuk luas ruang penyimpanan dan perbaikan 16 m². Lebar minimum ruang laboratorium komputer adalah 8 m.

Saat ini tersedia ruangan yang dapat digunakan sebagai laboratorium komputer berukuran 12,5 x 9,5 m atau seluas 118,75 m². Dengan demikian ketersediaan laboratorium komputer sudah memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.

Fasilitas dalam Laboratorium Komputer

Fasilitas standar yang harus tersedia dalam ruang laboratorium komputer menurut Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut:

Apabila peralatan dan bahan-bahan praktikum siswa dan semua fasilitas belum tersedia maka akan dilakukan sharing laboratorium komputer dengan SMK di Manokwari dan/atau Universitas Papua.

Laboratorium Bahasa

Laboratorium bahasa merupakan fasilitas belajar penting yang harus disediakan untuk melatih skil berbahasa para peserta didik sejak awal mengenyam Pendidikan di SMA Taruna Kasuari Nusantara. Ketersediaan bangunan di kompleks eks BLK Manokwari yang akan dijadikan bangunan laboratorium sangat representatif.

Tabel 12. Fasilitas Standar Laboratorium Komputer

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
1. Perabot			
1.1	Kursi peserta didik	1 buah per peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja	1 buah per peserta didik	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung 1 unit komputer dan peserta didik bekerja berdua. Jika CPU diletakkan di bawah meja, maka harus mempunyai dudukan minimum setinggi 15 cm. Kaki peserta didik dapat masuk ke bawah meja dengan nyaman.
1.3	Meja dan kursi guru	1 buah per guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran kursi memadai untuk duduk dengan nyaman.
2. Peralatan Pendidikan			
2.1	Komputer	1 unit per praktikan, ditambah 1 unit untuk guru.	Mendukung penggunaan multimedia. Ukuran monitor minimum 15".
2.2	Printer	1 unit per Lab	
2.3	Scanner	1 unit per Lab	
2.4	Titik akses internet	1 titik per lab	Berupa saluran telepon atau nirkabel.
2.5	LAN (Local Area Network)	Sesuai dengan banyaknya komputer	Dapat berfungsi dengan baik.
2.6	Stabilizer dan UPS (Uninterruptible Power Supply)	Sesuai dengan banyaknya komputer	Setiap komputer terhubung dengan Stabilizer dan UPS
2.7	Modul Praktik	1 set per komputer	Terdiri dari sistem operasi, pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah gambar.
3. Media Pendidikan			
3.1	Papan tulis	1 buah per lab	Kuat, stabil, dan aman. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihat tulisan pada papan tulis dengan jelas.
4. Perlengkapan Lain			
4.1	Kotak kontak	Sesuai dengan	
4.2	Jam dinding	1 buah per lab	
4.3	Tempat sampah	1 buah per lab	

Standar ukuran bangunan laboratorium bahasa bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Menurut distributor peralatan laboratorium bahasa PT. Arion Indonesia (2018), ukuran bangunan laboratorium bahasa bervariasi menurut jumlah channel yang dibutuhkan. Untuk jumlah channel 28 dibutuhkan ukuran minimal bangunan 6 x 7 m atau 42 m². Di kompleks eks BLK Manokwari tersedia bangunan berukuran 12,9 x 9,5 m atau 122,55 m². Berdasarkan jumlah peserta didik yaitu awal yang akan diterima yaitu 24 orang per rombel, maka ketersediaan bangunan tersebut dianggap memenuhi syarat minimal untuk difungsikan menjadi laboratorium bahasa.

Peralatan dalam laboratorium Bahasa yang harus disiapkan adalah Perangkat Utama terdiri dari (1) Panel Pengendali: panel ini mengendalikan secara keseluruhan panel utama atau disebut panel pengendali dapat berupa perangkat sistem mikro controller atau komputer. (2) Panel siswa: Aktivitas siswa tergantung pada kelengkapan sistem yang dimiliki oleh panel. panel ini terdiri dari beberapa tombol dan lampu yang kedap-kedip. panel siswa pada tipe laboratorium bahasa berupa sistem yang lebih lengkap. (3) Headset: Merupakan sebuah perangkat untuk sistem audio yang menjadi sumber suara untuk berbagai instruksi.

Laboratorium bahasa juga perlu dilengkapi dengan perabotan. Perabotan dalam lab terdiri dari kursi siswa, meja siswa dan meja instruktur, karpet, papan tulis atau white board, dan AC atau pendingin udara dalam ruangan. Ketersediaan semua peralatan lab dan perabotan sedang dalam proses penyelesaian, sehingga diharapkan sudah siap digunakan pada awal tahun ajaran.

d. Perpustakaan Sekolah

Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 perpustakaan Sekolah Menengah Umum harus memenuhi standar minimal ukuran bangunan 72 m² untuk 3 sampai 6 rombel. SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat akan menerima 3 rombel, dengan jumlah peserta didik adalah 24 orang per rombel. Di BLK Manokwari telah tersedia bangunan perpustakaan dengan ukuran sangat representatif yaitu 25,7 m x 10 m atau 257 m². Dengan demikian luas bangunan ini sudah sangat layak untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan sekolah.

Tabel 13. Kebutuhan Khusus Sebuah Perpustakaan

No.	Jenis	Ratio	Deskripsi
1.	Perabot kerja	1 set/pengguna	Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.
2.	Perabot penyimpanan	1 set/perpustakaan	Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
3.	Peralatan multimedia	1 set/perpustakaan	Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
4.	Perlengkapan lain	1 set/perpustakaan	Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman.

Koleksi perpustakaan paling sedikit yang harus disediakan sebelum awal tahun ajaran adalah koleksi referensi paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, 5 (lima) jenis kamus bahasa asing, kamus subjek, ensiklopedi, buku statistik daerah, direktori, peraturan perundang-undangan, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci. Pengaturan perpustakaan sesuai ketentuan paling sedikit meliputi area koleksi, area baca, area kerja, dan area multimedia.

4.7.2 Asrama Siswa

SMA Taruna Kasuari Nusantara adalah sekolah menengah umum berpola asrama. Penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi para siswa berupa asrama harus sudah tersedia sebelum operasional sekolah dimulai pada bulan Juli 2021. Saat ini, di kompleks eks BLK Manokwari telah tersedia bangunan asrama yang sangat memadai dan nyaman untuk menampung para peserta didik selama menempuh Pendidikan. Luas asrama di kompleks eks BLK

Manokwari lebih dari 2000 m², sudah termasuk ruang tamu 144 m². Jumlah kamar yang tersedia adalah 36, luas setiap kamar adalah 36 m², dengan kapasitas tampung empat orang peserta didik per kamar.

Pada rencana awal, SMA Taruna Kasuari Nusantara akan membuka tiga rombongan dengan total peserta didik 72 orang. Dengan demikian jumlah kamar yang disediakan sudah lebih dari cukup untuk ditempati oleh para peserta didik. Total 18 kamar dari 36 akan digunakan sebagai tempat tinggal peserta didik yang semuanya pria. Sisa kamar yang lain akan dipersiapkan untuk penerimaan peserta didik putri.

Perabot dalam kamar terdiri dari dua tempat tidur bertingkat, empat meja belajar dan empat lemari pakaian. Di dalam kamar dilengkapi dengan satu kamar mandi yang direncanakan menggunakan shower. Setiap tempat tidur dilengkapi dengan kasur berukuran 100 x 200 x 20 cm, satu buah bantal guling, satu buah bantal kepala dan satu buah selimut. Peralatan lain adalah setrika pakaian, jam dinding dan tempat jemur handuk, kursi santai di depan setiap kamar.

4.7.3 Ruang Makan dan Dapur

Ruang makan bagi siswa di kompleks BLK sangat memadai untuk digunakan. Daya tampung minimum ruang makan adalah lebih dari 80 orang. Ruang makan juga telah dilengkapi dengan dapur yang dapat digunakan untuk mempersiapkan makanan bagi 72 peserta didik. Luas ruang makan yang tersedia adalah 339,12 m², luas area penyediaan makanan 40,8 m², sedangkan dapur luasnya 153,36 m². Saat ini renovasi ruang makan dan dapur sedang berlangsung, sehingga sudah tersedia sebelum penerimaan peserta didik baru pada bulan Juli 2021. Ruang makan dilengkapi dengan meja makan 12 buah, kursi makan 72 buah, taplak meja dan tempat cuci tangan. Semua peralatan ruang makan akan dilengkapi sebelum bulan Juli 2021 oleh Pemda Provinsi Papua Barat.

4.7.4 Perlengkapan Belajar Peserta Didik

Semua siswa atau peserta didik SMA Taruna Kasuari Nusantara akan dilengkapi semua kebutuhan belajarnya oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Perlengkapan sekolah yang disediakan adalah pakaian seragam dan peralatan belajar. Perlengkapan yang sudah harus ada sebelum proses belajar mengajar dimulai adalah pakaian seragam nasional untuk SMA dua

pasang (baju, celana, topi dan dasi), dua pasang pakaian seragam khusus yang dilengkapi tanda pangkat sebagai simbol kelas, topi berlogo SMA Taruna Kasuari Nusantara, sepatu, kaos kaki, ikat pinggang berlogo sekolah. Satu pasang pakaian Pramuka beserta atribut lengkap. Selain itu akan disiapkan juga handuk, sabun mandi, sikat gigi dan odol untuk keperluan MCK sehari-hari di asrama. Disediakan juga buku tulis, bolpen, pensil dan penghapus. Untuk setiap mata pelajaran akan disediakan satu buku tulis dan satu buku teks per peserta didik. Untuk keperluan praktikum mata pelajaran IPA disediakan juga jas laboratorium.

4.7.5 Kantor Sekolah

Kantor Sekolah akan menempati eks Kantor Balai Latihan Kehutanan Manokwari. Ukuran gedung kantor yang tersedia saat ini adalah 715 m². Gedung kantor dilengkapi dengan 7 ruangan masing-masing berukuran 51,5 m², ruang rapat berukuran 286 m², dan ruang tamu berukuran 150 m². Ruangan dalam Gedung kantor sekolah dapat diperuntukkan untuk satu ruang kepala sekolah, satu ruang wakil kepala sekolah, satu ruang administrasi sekolah dan sisanya dapat dimanfaatkan sebagai ruang guru dan ruang OSIS.



Bangunan eks. BLK yang kemudian akan digunakan sebagai kantor sekolah

4.7.6 Lapangan Upacara

Kompleks BLK Manokwari telah dilengkapi dengan lapangan upacara berukuran 3600 m². Letak lapangan upacara adalah di depan gedung kantor sekolah dan asrama siswa. Lapangan upacara relatif datar dengan kondisi rumput cukup terawat dengan baik. Lapangan ini selain dapat digunakan untuk upacara, dapat juga digunakan untuk kegiatan latihan baris-berbaris, senam pagi, olah raga atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bersifat outdoor.



Kondisi eksisting lapangan yang dapat digunakan sebagai tempat upacara bendera SMA Taruna Kasuari NUSantara

4.7.7 Rumah Guru dan Rumah Kepala Sekolah

Pada awal operasional sekolah SMA Taruna Kasuari Nusantara, sejumlah guru akan ditempatkan di mess guru. Bangunan yang disediakan untuk dialihfungsikan sebagai mess guru adalah bangunan berlantai dua berukuran 20 x 10 x 8 m. Selain itu disediakan juga Gedung satu lantai berukuran 20,5 x 16 m. Kepala sekolah akan menempati rumah eks kepala Balai Latihan Kehutanan, yang berada di depan kantor sekolah dan Gedung perpustakaan.

4.7.8 Tempat Ibadah

Kompleks eks BLK Manokwari telah dilengkapi dengan dua bangunan rumah ibadah yaitu Mushola dan Chappel (gereja kecil) Oikumene. Kondisi gereja sangat terawat dengan baik, sedangkan bangunan Mushola perlu beberapa

renovasi ringan. Pada prinsipnya, semua fasilitas eks Balai Latihan Kehutanan Manokwari layak dialihfungsikan sebagai bangunan sekolah SMA Taruna Kasuari Nusantara.

4.8 Kelembagaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), kelembagaan didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Kelembagaan yang dibentuk pada SMA Taruna Kasuari Nusantara terdiri dari kelembagaan internal dan eksternal. Kelembagaan internal mengatur jalannya proses belajar mengajar di SMA Taruna Kasuari Nusantara, sedangkan kelembagaan eksternal berperan dalam mengatur dan mengawasi pendanaan, serta aktivitas kelembagaan SMA Taruna Kasuari Nusantara. Kelembagaan eksternal sekolah didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada Pasal 8, ayat 1 menyatakan Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. Selanjutnya pada Pasal 9, ayat 6 menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Berdasarkan Perda ini, disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan BPSDM memiliki fungsi yang hampir sama, yakni bertanggungjawab terhadap pendidikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembentukan suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Provinsi yang berbentuk Pendidikan Formal sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. UPT Pendidikan Provinsi akan memiliki tugas sebagai lembaga eksternal sekolah yang bertanggungjawab penuh terhadap aktivitas dan operasional sekolah yang pembentukannya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Pembentukan UPT ini direncanakan akan berada di bawah koordinasi BPSDM Provinsi Papua Barat, sedangkan pelaksanaan

Tabel 14. Lembaga Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat di Bidang Pendidikan

Lembaga	Pertimbangan Tugas dan Fungsi
BPSDM	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki fungsi penunjang dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di Papua Barat dimana sesuai dengan tujuan utama dari pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara untuk pembentukan siswa yang unggul baik di bidang akademik maupun dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan. Memiliki ketersediaan sumberdaya manusia yang mumpuni untuk Pengelolaan SMA Taruna Kasuari Nusantara.
Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Memiliki ketersediaan sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional sekolah secara menyeluruh.

monitoring dan evaluasi (Monev) akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dengan beberapa pertimbangan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Kelembagaan internal didasarkan pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas mengelola pendidikan umum, SMA harus menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana pendidikan, pelaksana bimbingan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah dan atau masyarakat, serta pelaksana administrasi. Oleh sebab itu susunan organisasi dan kelembagaan pada satuan pendidikan menengah atas harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional sebagaimana yang di atur dalam Pasal 13 Permendikbud No 6 Tahun 2019.

4.9 Persepsi Masyarakat

Rencana pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di Papua Barat merupakan hal positif dalam pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat. Salah satu aspek kelayakan berdasarkan Permendikbud Nomor 36

Tahun 2014 Pasal 2 ayat 2 (b) adalah kelayakan dari segi sosial dan budaya. Hal ini berarti pendirian sekolah tidak boleh bertentangan dengan sistem sosial dan adat istiadat masyarakat setempat di mana lokasi pendirian sekolah.

Sistem sosial dan adat istiadat yang berlaku di sekitar lokasi pendirian sekolah adalah sistem sosial dan adat penduduk yang berasal dari wilayah adat Doberay dan Bomberay (Mofu dan Deda, 2014) yang memiliki wakil di Majelis Rakyat Papua dan Dewan Adat Papua. Selain itu, keterwakilan masyarakat sekitar juga berada di Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi Pendidikan dan Fraksi Otsus. Oleh karena itu, sebelum sekolah ini didirikan perlu untuk mengetahui persepsi masyarakat melalui perwakilan pada lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan masyarakat melalui lembaga MRP, DPR dan Dewan Adat, persepsi masyarakat di Provinsi Papua Barat sangat mendukung kehadiran SMA Taruna Kasuari Nusantara. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya sekolah ini, diharapkan semakin banyak anak asli Papua yang bisa diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia bahkan di luar negeri. Selain itu, ada beberapa hal yang mereka inginkan dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan di SMA Taruna Kasuari Nusantara yaitu adanya prioritas penerimaan bagi calon siswa asli Papua dan adanya pelajaran dalam bentuk muatan lokal tentang adat istiadat Papua. Persepsi yang positif ini ditunjukkan dengan memberikan dukungan dalam bentuk pernyataan Dukungan dan Rekomendasi pendirian sekolah unggulan Kasuari Nusantara di Manokwari. Surat dukungan dari DAP, MRPB, DPRPB dan LMA dapat dilihat pada Lampiran. Dengan adanya persepsi yang sangat mendukung yang ditandai dengan adanya pernyataan Dukungan dan Rekomendasi dari masyarakat sekitar melalui perwakilannya di MRP, DAP dan DPR, maka dari segi persepsi masyarakat pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara layak untuk didirikan.

4.10 Sitem Penjaminan Mutu SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat

4.10.1 Ketentuan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut dilakukan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

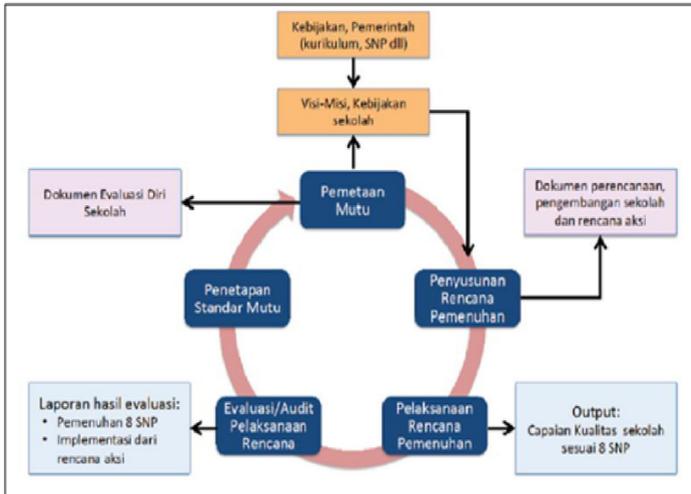
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, dimana perumusan penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Sementara, sistem penjaminan mutu pendidikan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI-Dikdasmen) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME-Dikdasmen). SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen. Sedangkan, SPME-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.10.2 Implementasi SPMI pada SMA

Satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang: (a) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdasmen; (b) Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: dokumen kebijakan, dokumen standar, dan dokumen formulir; (c) Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; (d) Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; (e) Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan (f) Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.



Gambar 9. Siklus SPMI pada SMA

Tim penjaminan mutu pendidikan terdiri atas: perwakilan pimpinan sekolah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan; dan perwakilan komite sekolah. Tugas tim penjaminan mutu pendidikan adalah:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat sekolah;
- Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di sekolah dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di sekolah;
- Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala sekolah.

SPMI-Dikdasmen ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. SPMI-Dikdasmen mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Siklus SPMI pada SMA terlihat pada Gambar 9, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Memetakan mutu pendidikan pada tingkat sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
- c. Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. Menyusun strategi peningkatan standar mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan pada SMA.

Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter/elemen penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja dalam menjalankan program-programnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan mencakup:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses;
- d. standar penilaian Pendidikan;
- e. standar tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan.

Berikut standar mutu pendidikan SMA yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021, yaitu :

1. Standar Kompetensi Lulusan.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada SMA difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan menetapkan bahwa setiap lulusan sekolah menengah atas memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan kriteria standar mutu sebagai berikut:

- ◇ Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,
 - b. berakarakter, jujur, dan peduli,
 - c. bertanggungjawab,
 - d. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan
 - e. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.

- ◇ Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan:
 - a. ilmu pengetahuan,
 - b. teknologi,
 - c. seni,
 - d. budaya, dan
 - e. humaniora.

- ◇ Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.

- ◇ Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:
 - a. kreatif,
 - b. produktif,
 - c. kritis,
 - d. mandiri,
 - e. kolaboratif, dan
 - f. komunikatif.

2. Standar Isi

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi standar isi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: (a) Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) Konsep keilmuan; dan (c) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 menetapkan standar isi sebagai berikut :

Tabel 15. Standar isi (mata pelajaran, kompetensi dan ruang lingkup materi)

No.	Mata pelajaran	Kompetensi	Ruang lingkup materi
1.	Pendidikan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif, - Dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. - Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. - Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 	Disesuaikan dengan agama masing-masing

		<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif; - Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan. 	
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis, dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. - Menyajikan bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Menunjukkan sikap positif terhadap NKRI dilihat dari konteks geopolitik. - Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender. - Mengamalkan dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil. - Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. - Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia.

3.	Bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, responsif dan santun dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menanggapi fenomena alam dan sosial. - Mengenal konteks budaya dan konteks sosial, satuan kebahasaan, serta unsur paralinguistik dalam penyajian teks. - Memahami bentuk, struktur, dan kaidah teks dalam genre cerita, faktual, dan tanggapan. - Membandingkan dan menganalisis teks dalam genre cerita, faktual, dan tanggapan. - Mengklasifikasi teks dalam genre cerita, faktual, dan tanggapan. - Memilih teks sesuai dengan genre untuk mengungkapkan gagasan. - Menemukan makna teks dalam genre faktual, tanggapan, dan cerita 	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk teks genre cerita (teks anekdot, pantun, cerita ulang), faktual (laporan hasil observasi, eksposisi, prosedur kompleks, eksplanasi kompleks), dan tanggapan (teks negosiasi dan review film/drama). - Struktur teks bergenre cerita (teks anekdot, pantun, cerita ulang), faktual (laporan hasil observasi, prosedur kompleks, eksplanasi kompleks), dan tanggapan (teks negosiasi dan review film/drama). - Konteks budaya dan situasi yang melatarbelakangi lahirnya sebuah teks.
		<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan teks dalam genre faktual, tanggapan, dan cerita secara lisan dan tulis dan menyuntingnya. - Mengabstraksi teks dalam genre faktual, tanggapan, dan cerita secara lisan dan tulis. - Mengalihkan teks dalam genre faktual, tanggapan, dan cerita secara lisan dan tulis ke dalam bentuk lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan bahasa pembentuk teks: bunyi bahasa, fonem, suku kata, morf, kata, kelas kata, diksi, frasa. - Penanda kebahasaan dalam teks. - Paralinguistik (lafal, kelantangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik).

<p>4.</p>	<p>Matematika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. - Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, semangat belajar yang kontinu, pemikiran reflektif dan ketertarikan pada matematika. - Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, serta sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar. - Memiliki sikap terbuka, objektif, dan menghargai karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. - Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas dan efektif. - Menjelaskan pola dan menggunakannya untuk melakukan prediksi dan kecenderungan jangka panjang; menggunakannya untuk memprediksi kecenderungan atau memeriksa kesahihan argument. - Mengutarakan dan menggali sifat-sifat fungsi pangkat dan logaritma, dengan memanfaatkan hubungan saling inverse keduanya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bilangan Real. - Aljabar. - Geometri dan Transformasi. - Dasar-dasar Trigonometri. - Limit fungsi Aljabar. - Matriks. - Kombinatorika. - Statistika dan Peluang. - Turunan Fungsi Aljabar. - Program Linear.
-----------	-------------------	--	---

		<ul style="list-style-type: none">- Menganalisis sifat grafik eksponensial dan logaritma, nilai mutlak dan memanfaatkannya dalam menyelesaikan persamaan logaritma, nilai mutlak.- Mengetahui dan menggunakan sifat-sifat aljabar dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dan kuadrat dan pertidaksamaan linear dan kuadrat, dibantu dengan teknik geometri, dan memberikan tafsiran geometrinya.- Memahami dan menggunakan konsep operasi aljabar fungsi termasuk komposisi.- Menggunakan sifat-sifat transformasi untuk menyelidiki kesebangunan dan kekongruenan dan menggunakannya untuk memahami perbandingan trigonometri, persamaan trigonometri.- Memanfaatkan pendekatan koordinat dalam menyelesaikan masalah geometri (dan juga aljabar pada umumnya).- Memahami sifat geometri bidang yang menyangkut dalil titik berat segitiga, dalil intersep, dalil segmen garis dan menggunakannya dalam membuktikan sifat geometri.- Mendeskripsikan konsep fungsi trigonometri dan hubungan diantaranya.- Memahami persamaan berbagai irisan kerucut dan grafiknya dan kaitannya.- Menggunakan konsep limit untuk memahami kecenderungan fungsi dan menghampiri fungsi.- Menggunakan konsep turunan untuk memahami kecenderungan dalam laju perubahan serta menggunakannya dalam pemodelan.	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Memberi estimasi dengan menggunakan perhitungan mental dan sifat-sifat aljabar dan data statistik. - Pemanfaatan rasio dan proporsi dalam menyederhanakan (scaling) masalah, mengestimasi dan menghitung perubahan rasio (turunan). - Membandingkan dan menilai keefektifan berbagai metoda penyajian data. - Memahami dan menggunakan berbagai teknik menghitung, dengan prinsip perkalian sebagai prinsip perkalian sentral. - Memahami konsep peluang yang didasarkan frekuensi relatif; memanfaatkan teknik kombinatorika dalam menentukan peluang - Menentukan strategi penyelesaian masalah yang efektif, mengevaluasi hasil, dan melakukan perumuman. 	
5.	Biologi	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami ruang lingkup biologi dan aplikasinya di era konseptual abad XXI dan menerapkannya dalam perencanaan karir di masa depan. - Menerapkan proses kerja ilmiah dan keselamatan kerja dilaboratorium biologi dalam pengamatan dan percobaan untuk memahami permasalahan biologi pada berbagai objek dan bioproses, serta mengaitkan biologi dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat di abad XXI. - Mengkomunikasikan hasil pengamatan dan percobaan secara lisan melalui berbagai media dan secara tulisan dengan bentuk laporan dengan menggunakan kaidah penulisan yang benar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanekaragaman hayati Indonesia. - Ciri dan karakteristik virus, archaebacteria dan eubacteria, protista, jamur, tumbuhan, hewan invertebrata dan peranannya dalam kehidupan. Ekologi: ekosistem, aliran energi, siklus/daur biogeokimia, dan interaksi dalam ekosistem. - Perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah.

		<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan data berbagai objek dan bioproses berdasarkan pengamatan dan percobaan dengan menerapkan prosedur ilmiah dan memperhatikan aspek keselamatan kerja. - Menerapkan prinsip, konsep, dan hukum dalam bidang biologi untuk memecahkan permasalahan nyata dan lingkungan hidup. - Menganalisis berbagai keanekaragaman hayati di Indonesia, bioproses yang berlangsung pada berbagai tingkat organisasi seluler pada sistem hidup, menganalisis perilaku negatif dan dampak dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan. - Menunjukkan kemampuan metakognitif terhadap permasalahan pada berbagai objek dan tingkat organisasi kehidupan dan menerapkannya dalam kehidupan sebagai warga negara yang baik dan wujud cinta tanah air dan bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sel, struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan pada sistem gerak, sirkulasi, pencernaan, pernapasan/ respirasi, ekskresi, koordinasi, reproduksi, dan sistem pertahanan tubuh- Struktur dan fungsi DNA, gen dan kromosom dalam pembentukan dan pewarisan sifat serta regulasi proses pada makhluk hidup. - Proses kelangsungan hidup di bumi melalui mutasi dan evolusi. - Penerapan bioproses pada bioteknologi.
6.	Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks pendek dan sederhana. - Berkomunikasi secara interpersonal, transaksional, dan fungsional tentang diri sendiri, keluarga, orang lain, dan objek kongkrit dan imajinatif, yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan siswa sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. - Menyusun teks lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan menggunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Teks-teks: factual report, ilmiah, prosedur, naratif, dan iklan, dalam wacana interpersonal, transaksional, dan fungsional pada tataran literasi fungsional. - Struktur teks interpersonal, transaksional, dan fungsional. - Keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis teks interpersonal, transaksional, dan fungsional yang tercakup.

			<ul style="list-style-type: none"> - Unsur-unsur kebahasaan. - Frasa pendek dan sederhana. - Modalitas: dengan batasan makna yang jelas.
7.	PJOK	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis dan memperbaiki kesalahan variasi dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan dan olahraga. - Menganalisis variasi, kombinasi dan memperbaiki kesalahan keterampilan olahraga beladiri. - Menganalisis konsep dan mempraktikkan latihan, pengukuran komponen kebugaran jasmani. - Menganalisis dan mempraktikkan rangkaian keterampilan senam lantai. - Menganalisis dan mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan rangkaian gerak ritmik. - Menganalisis dan memperbaiki kesalahan keterampilan tiga gaya renang yang berbeda dan penyelamatan aktivitas di air. - Memiliki perilaku hidup sehat dalam memilih makanan dan minuman dan menghindari diri dari tindakan merugikan diri sendiri. - Mengamalkan perilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, toleransi, bekerja sama, disiplin, dan menerima kekalahan dengan sikap positif dan mengekspresikan kemenangan dengan wajar 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas fisik olahraga permainan dan atletik - Permainan bola besar, sepak bola, bola voli, bola basket. - Permainan bola kecil, dan atletik: softball, bulutangkis, tenis meja. - Aktivitas fisik gerakan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar atau permainan tradisional sejenis. - Menguasai aktivitas fisik beladiri: pencak silat, karate, taekwondo atau beladiri tradisional sejenis. - Menguasai rangkaian Aktivitas fisik melalui: latihan pengembangan kekuatan, daya tahan, kelentukan, kecepatan, dan koordinasi. - Menguasai aktivitas fisik rangkaian : senam lantai dan senam alat. - Menguasai rangkaian gerakan aktivitas fisik ritmik: senam aerobik dan SKJ secara harmonis. - Menguasai gerakan aktivitas fisik di air: renang gaya bebas, gaya dada dan penyelamatan dalam aktivitas air.

8.	Muatan Prakarya	<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli lingkungan, kerjasama, jujur, percaya diri, dan mandiri dalam berkarya prakarya.- Menganalisis desain produk, sumber daya, dan proses pembuatan karya.- Mendesain produk dan proses pembuatan karya.	<ul style="list-style-type: none">- Apresiasi dan kreasi prakarya (Kerajinan)- Kerajinan tekstil dan limbah tekstil.- Kerajinan dari bahan lunak dan bahan keras.- Apresiasi dan kreasi prakarya (Rekayasa)- Rekayasa alat
----	-----------------	---	--



Rencana kanntor SMA Taruna Kasuari Nusantara

3. Standar Proses

Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan: (a) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran; (b) Cara untuk mencapai tujuan belajar; dan (c) Cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi.

Pernyataan standar proses pembelajaran ditetapkan melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :

- Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.
- Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).
- Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- Alokasi waktu dalam pelaksanaan proses pembelajaran selama 1 jam tatap muka setara dengan 45 menit.
- Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
- Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian

otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap.

4. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme penilaian merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi: (a) Perumusan tujuan penilaian; (b) Pemilihan dan/atau pengembangan instrument penilaian; (c) Pelaksanaan penilaian; (d) Pengolahan hasil penilaian; dan (e) Pelaporan hasil penilaian. Penilaian pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan: kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan.

Pernyataan standar penilaian Pendidikan di tetapkan pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan sebagai berikut:

- Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan menengah meliputi aspek:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, ujian sekolah dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

5. Standar Tenaga Kependidikan

Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi

yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan, motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan. Kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses Pendidikan pada satuan pendidikan.

6. Standar Sarana Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) mengamanatkan standar sarana prasarana sebagai berikut :

- ✘ Untuk SMA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 16. Ketentuan Luas Minimum untuk tiap Rombongan Belajar

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (m ²)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1.	3	2140	1360	-
2.	4-6	2570	1420	1290
3.	7-9	3040	1640	1340

- ✘ Untuk SMA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 17. Banyak Rombel dan Luas Minimum Lantai

No.	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lantai Bangunan (m ²)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1.	3	640	710	-
2.	4-6	770	830	860
3.	7-9	910	980	1010
4.	10-12	1070	1130	1160
5.	13-15	1200	1290	1290
6.	16-18	1330	1430	1430
7.	19-21	1500	1600	1600
8.	22-24	1670	1800	1810
9.	25-27	1810	1940	1950

- ✘ Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ruang kelas, | 6. Ruang laboratorium komputer, | 12. Ruang konseling, |
| 2. Ruang perpustakaan, | 7. Ruang laboratorium bahasa, | 13. Ruang UKS, |
| 3. Ruang laboratorium biologi, | 8. Ruang pimpinan, | 14. Ruang organisasi kesiswaan, |
| 4. Ruang laboratorium fisika, | 9. Ruang guru, | 15. Jamban, |
| 5. Ruang laboratorium kimia, | 10. Ruang tata usaha, | 16. Gudang, |
| | 11. Tempat beribadah, | 17. Ruang sirkulasi, |
| | | 18. Tempat bermain/berolahraga. |

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pernyataan standar pengelolaan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

- Dalam bidang perencanaan program, sekolah wajib merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah.
- Sekolah wajib membuat rencana kerja jangka menengah (4 tahunan) dan rencana kerja tahunan.
- Rencana kerja memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 1. Kesiswaan;
 2. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 3. Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 4. Sarana dan prasarana;
 5. Keuangan dan pembiayaan;
 6. Budaya dan lingkungan sekolah;
 7. Peran serta masyarakat dan kemitraan;
 8. Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
- Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
- Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.
- Pelaksanaan kegiatan sekolah harus sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik.
- Sekolah wajib :
 1. Memberikan layanan konseling kepada peserta didik;
 2. Melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik;

3. Melakukan pembinaan prestasi unggulan;
 4. Melakukan pelacakan terhadap alumni.
- Sekolah wajib menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
 - Sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - Sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
 - Sekolah/menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.
 - Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
 - Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

8. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan. Pembiayaan Pendidikan terdiri atas: (a) Biaya investasi; dan (b) Biaya operasional. Biaya investasi meliputi komponen biaya: (a) Investasi lahan; (b) Penyediaan sarana dan prasarana; (c) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan (d) Modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional meliputi komponen biaya: personalia dan nonpersonalia.

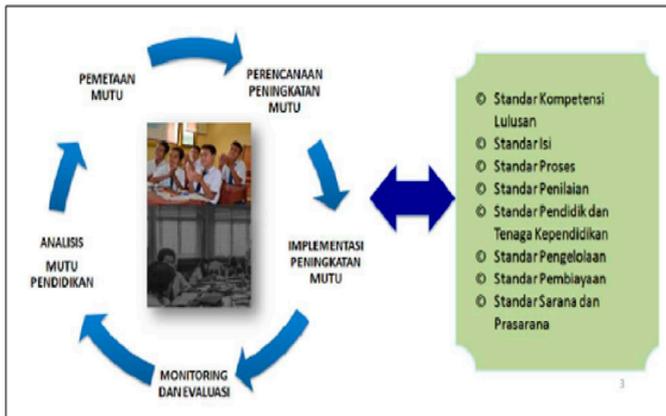
Pernyataan standar pembiayaan ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) sebagai berikut:

Besaran standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS) dan Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 18.

Tabel 18. Standar biaya operasi nonpersonalia per sekolah per rombongan belajar dan peserta didik.

No.	Sekolah/Program Keahlian	Biaya Operasional Nonpersonalia (Rp. Ribu)			% minimum untuk ATS	% Minimum untuk BAHP
		Per Sekolah/Program keahlian	Per Rombongan Belajar	Per Peserta Didik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI	97.440	16.240	580	10	10
2.	SMP/MTs	136.320	22.720	710	10	10
3.	SMA/MA Bahasa	184.320	30.720	960	10	10
4.	SMA/MA IPS	184.320	30.720	960	10	10
5.	SMA/MA IPA	193.920	32.320	1.010	10	10

Hubungan antara standar nasional pendidikan dengan siklus kegiatan SPMI dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Hubungan Standar Nasional Pendidikan dengan Siklus SPMI

Adanya peraturan Sistem Penjaminan Mutu yang konsisten dan berkelanjutan maka proses penyelenggaraan belajar pada SMA Taruna Kasuari Nusantara sesuai atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

LEMBAGA PERGURUAN TAMAN TARUNA NUSANTARA LPTTN



Untuk Membangun Sumber Daya Manusia
di Papua Barat Tidak ada Istilah
Tidak ada Rotan Akar pun Jadi
“ROTAN TETAP HARUS ROTAN”
(Drs. Dominggus Mandacan)

PENUTUP

Jumlah sekolah SMA masih belum mencukupi untuk menampung lulusan SMP setiap tahun, oleh karena itu, pendirian Unit Sekolah Baru (USB) masih sangat dibutuhkan.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SMA sederajat di Provinsi Papua Barat masih rendah, artinya masih terdapat anak usia SMA yang tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah di jenjang SMA dan salah satu faktor penyebab tidak/melanjutkan pendidikan khususnya di bidang SMA adalah ketersediaan sekolah. Selain itu, lulusan SMA sederajat di Provinsi Papua Barat yang diterima di universitas-universitas favorit masih sangat kecil karena kurangnya kemampuan/kompetensi dalam bidang MIPA dan Bahasa Inggris.

Pembentukan SMA Taruna Kasuari Nusantara, sejalan dengan Visi Misi Gubernur Provinsi Papua Barat TERWUJUDNYA PROVINSI PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT dan salah satu misinya yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Papua Barat yang berdaya saing

Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan di Papua Barat

Seluruh aspek yang dikaji mengenai kelayakan pembentukan SMA Taruna Kasuari Nusantara, yakni aspek input siswa, kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, keuangan/pembiayaan, sarana prasarana, kelembagaan dan persepsi masyarakat, dikategorikan 'layak'.

Memperkuat komitmen dan sinergi semua pihak untuk mendukung pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara melalui kebijakan (MoU, PKS dan regulasi) adalah penting untuk menjadi perhatian bersama. Perlu dilakukan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.



Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan bersama Tim kerja penyusunan dokumen pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara dan OPD Teknis terkait

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. 1992. Pengembangan Kurikulum Di Sekolah. Penerbit Sinar Baru. Jakarta.

Arikunto, S. dan C. S. A. Jabar. 2018. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Edisi kedua. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, 2019. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat, Agustus 2019.

Baderiah. 2018. Buku Ajar Pengembangan Kurikulum. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. Palopo.

BPS Provinsi Papua Barat, 2020. Papua Barat Dalam Angka 2020.

BPS Provinsi Papua, 2020. Papua Dalam Angka 2020.

Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. 2020.

DJPK Kemenkeu, 2021. Realisasi APBD Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 2016 – 2021. Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Garcia-Milà, T., & McGuire, T. (2007). Fiscal decentralization in Spain: an asymmetric transition to democracy. *Fiscal Fragmentation in Decentralized Countries*, 208-223.

Hamalik, O. 2003. Kurikulum dan Pembelajaran. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Idi, A. 2011. Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik. Penerbit Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Pedoman Implementasi: Muatan/Mata pelajaran Informatika Kurikulum 2013. Badan Penelitian Dan Pengembangan. Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat, 2017. Profil Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Provinsi Papua Barat tahun 2017

Nasution, S. 2012. Kurikulum dan Pengajaran. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Neraca Pendidikan Daerah. <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=akreditasi>. Diunduh tanggal 1 Mei 2021

Perguruan Taman Taruna Nusantara. 1989. Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Perguruan Taman Taruna Nusantara. Jakarta.

Rusdi, R. 2017. Kurikulum: Perencanaan, Implementasi, Evaluasi, Inovasi dan Riset. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Septania Caesaria Setiadi, Junaidi Indrawadi, 2020. Pelaksanaan Program Boarding school

Solé-Ollé, A. and Esteller-Moré, A. (2005). Decentralization Provision of Public Inputs, Government Responsiveness to Local Needs, and Regional Growth: Evidence from Spain. Institut d'Economia de Barcelona Working Paper. Barcelona: Institut d'Economia de Barcelona.

Sukmadinata, N S. 2019. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Watts, R.L. (1999). Comparing Federal Systems. Second edition. Kingston, Canada: Institute of Intergovernmental Relations, Queen's University.

Yani, A. 2014. Mindset Kurikulum 2013. Penerbit Alfabeta. Bandung.

PROFIL SINGKAT PENULIS

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS. Lahir di Manokwari, pada 6 Desember 1973. Profesor Heatubun adalah staf Dosen Tetap di Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari sejak tahun 1998. Menyelesaikan S1 Jurusan Kehutanan pada tahun 1997, di Fakultas Pertanian, Universitas Cenderawasih Manokwari (sekarang Universitas Papua). Pada tahun 2006 meraih S2 pada Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor. Selanjutnya tahun 2009 menyelesaikan S3 di IPB, Bogor dan The Royal Botanic Gardens Kew, Inggris. Kemudian Post Doctoral pada institusi yang sama pada tahun 2011. Ditetapkan sebagai Guru Besar bidang Botani Hutan di Fakultas Kehutanan Universitas Papua pada tahun 2012. Sejak tahun 2017 ditugaskan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan dan tahun 2018 resmi menjabat sebagai Kepala Badan. Terpilih sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan se-Indonesia dan meraih piala Adhigana 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ir. Abdul Haviedz Fatamasya, M.Si. Lahir di Fakfak 10 September 1967. Menamatkan S1 dengan program studi Agronomi pada Faperta Uncen Manokwari tahun 1992 dan S2 dengan program studi Pembangunan Masyarakat pada Universitas Hasanuddin Makasar. Mulai bekerja sebagai ASN pada tahun 1996 di Kabupaten Fakfak. Pada tahun 2018, pindah ke Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai staf. Sejak tahun 2021 menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Dr. Meky Sagrim, SP, M.Si. Lahir di Ayamaru, 5 Mei 1969. Dr. Meky Sagrim menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih tahun 1995 dan S2 Sosiologi Pedesaan tahun 2002 pada Institut Pertanian Bogor (IPB). Tahun 2010 menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Kehutanan (Mayor), Sosiologi Masyarakat Hutan (Minor) pada Universitas Mulawarman Samarinda. Dosen tetap pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Faperta UNCEN sejak tahun 1996 hingga saat ini. Pada tahun 2012 – 2015 pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian (FAPERTEK) UNIPA. Sejak tahun 2020 menjabat sebagai Rektor Universitas Papua periode 2020 -2024.

Dr. Ir. D. Wasgito Purnomo, M.Si. Lahir di Brebes, 21 April 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Faperta Uncen tahun 1992. Tahun 2002 dan 2008 menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Institut Pertanian Bogor. Bekerja sebagai Dosen tetap Faperta Unipa sejak tahun 1995 sampai sekarang. Mendapatkan beberapa hibah penelitian DIKTI antara lain: PSPN, Stranas, MP3EI dan KKP3N. Saat ini menjabat sebagai ketua LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu) UNIPA.

Ir. Budi Santoso, M.P, Ph.D. Lahir di Merauke, 25 Mei 1969. Menyelesaikan S1 pada Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian, Universitas Cenderawasih tahun 1992 dan S2 pada Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 1999. Selanjutnya tahun 2015 menyelesaikan S3 pada Jurusan Teknologi Hasil Pertanian pada Universitas Mie Jepang. Dosen tetap pada Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua sejak tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Teknologi Pertanian.

Dr. Amestina Matualage, S.P, M.Sc. Lahir di Biak, 30 Agustus 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Papua Manokwari serta S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2010 dan 2019. Bekerja sebagai Dosen tetap di Faperta Unipa sejak tahun 2002 sampai sekarang. Tahun 2020 diangkat menjadi Kepala Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Universitas Papua.

Dr. Elieser V. Sirami, S.Hut, M.Sc. Lahir di Serui, 10 Juli 1979. Menyelesaikan S1 pada Program Studi Budidaya Hutan Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih (sekarang Universitas Papua) tahun 1997 dan S2 Ilmu Kehutanan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2014. Menyelesaikan S3 ilmu kehutanan tahun 2020 di Fakultas Kehutanan UGM. Dosen tetap Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Unipa sejak tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Keanekaragaman Hayati Unipa.

Dr. Aplena Elen Bless, SP, M.Sc. Lahir di Sorong, 22 April 1981. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Pertanian Universitas Papua (saat ini Unipa) tahun 1999 dan S2 di di Bidang Studi Soil Science Universitas Wageningen, Belanda tahun 2011. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Universitas SupAgro Montpellier Prancis tahun 2015. Dosen tetap pada Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Papua tahun 2006 dan saat ini menjabat sebagai kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua.

Dr. Albertus Girik Allo, SP, M.Si. Lahir di Ujung Pandang, 17 Agustus 1982. Menyelesaikan S1 pada program studi Sosial Ekonomi Pertanian pada Universitas Papua tahun 2004 dan S2 Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan pada Institut Pertanian Bogor tahun 2008 serta S3 Ilmu Ekonomi pada Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Saat ini fokus studi pada bidang ekonomi pembangunan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan wilayah. Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua sejak tahun 2008.

Martua Hutabarat, SP, M.Dev.Pact (Adv). Lahir di Riau, 19 Mei 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian Universitas Papua tahun 2003 dan pendidikan S2 bidang keahlian Studi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat pada The University of Queensland Australia tahun 2010. Dosen tetap pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Papua (Unipa) sejak tahun 2005 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Papua.

Berlian Sorga Abdullah, S.Pd. Lahir di Jember, pada tanggal 26 Juni 1989. Menyelesaikan Sarjana Pendidikan Matematika pada Universitas Jember pada tahun 2012. Bekerja sebagai guru SD pada tahun 2006. Pada tahun 2012 hijrah ke Manokwari dengan bekerja sebagai guru di SMP Negeri 2 Manokwari. Sejak tahun 2020 hingga saat ini mengajar di SMP Negeri 6 Manokwari.

Purbokurniawan, SP., M.Si. Lahir di Surabaya, 23 Februari 1977. Pada tahun 2004, menyelesaikan Pendidikan S1 bidang ilmu Agronomi di Universitas Papua tahun 2013 dan S2 bidang ilmu pemuliaan tanaman di Institut Pertanian Bogor. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di jurusan budidaya pertanian dan juga menjabat sebagai kepala laboratorium lapangan Fakultas Pertanian.

Ferdinandus Hurulean, SP. Lahir di Manokwari, 26 November 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan budidaya pertanian di Universitas Papua tahun 2004. Memulai karir sebagai ASN sejak tahun 2006 - 2017 di Kabupaten Teluk Wondama. Tahun 2017 pindah ke Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat sebagai staf. Sejak tahun 2020 menjabat sebagai kepala sub bagian perencanaan dan keuangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Mohamad Farid, S.Hut, M.Si. Lahir di Majene, 6 Februari 1974. Menyelesaikan S1 tahun 1998 pada jurusan konservasi sumberdaya hutan Fakultas kehutanan IPB, kemudian menyelesaikan S2 tahun 2008 bidang ilmu lingkungan pada Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai konsultan pada yayasan Econusa.



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

Gedung Kantor Gubernur Sayap 1 Lt. 2 dan 3
Jl. Brig. Jen. Mar. (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari
Papua Barat 98312

ISBN 978-623-93246-9-8



9 786239 324698

SCAN QR Code
untuk mendownload
buku versi PDF



<http://balitbangda.papubaratprov.go.id>



@balitbangdaPap1



Balitbangda Papua Barat



balitbangda_papua_barat